



**PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KOTA BOGOR PERIODE 2017-2021**

Skripsi

Dibuat Oleh:

M. Bagas Rudianto

022118042

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2023



**PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KOTA BOGOR PERIODE 2017-2021**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., C.a., CSEP., QIA)

**PENGARUH BELANJA MODAL PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA BOGOR
PERIODE 2017-2021**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari : Rabu, 26 Juli 2023

Muhammad Bagas Rudianto
022118042

Disetujui

Ketua penguji sidang
(Amelia Rahmi, SE., M.Ak., AWP)

Ketua komisi pembimbing
(Dr. Edy Sudaryanto, Drs, Ak., MM, CA)

Anggota komisi pembimbing
(Sigit Edy Surono, Drs., MM)



The image shows three handwritten signatures, each placed above a horizontal line. The top signature is a small, stylized mark. The middle signature is a large, cursive script. The bottom signature is a large, cursive script.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Bagas Rudianto

NPM : 022118042

Judul skripsi : Pengaruh Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bogor Di Periode 2017-2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 26 Juli 2023



Muhammad Bagas Rudianto

022118042

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan atau memperbanyak Sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

MUHAMMAD BAGAS RUDIANTO. 022118042. Pengaruh Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bogor Periode 2017-2021. Di bawah bimbingan : EDY SUDARYANTO dan SIGIT EDY SURONO. 2023

Pembangunan infrastruktur daerah akan berdampak pada meningkatnya kemandirian daerah mendorong pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan meningkatkan pelayanan publik, karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya asset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan sekunder yang bersumber dari laporan situs resmi Kota Bogor menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Kolonieritas, Uji Hetereskedastisitas, dan Uji Auto Korelasi, Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis yang terdiri dari Uji Determinasi, Uji Statistik F, dan Uji Statistik T, dengan menggunakan SPSS versi 25.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil pengujian secara simultan juga menyatakan bahwa Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam menyusun kebijakan strategi yang efektif dan efisien untuk kegiatan terhadap stimulus Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor

Kata kunci : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

MUHAMMAD BAGAS RUDIANTO. 022118042. The Influence of Capital Expenditure of Regional Original Income on Economic Growth in Bogor City for the 2017-2021 Period. Under the guidance of : EDY SUDARYANTO and SIGIT EDY SURONO. 2023

Regional infrastructure development will have an impact on increasing regional self-sufficiency to encourage economic growth towards an increase in Regional Original Income (PAD). With the increase in capital expenditure, it is hoped that public services will improve, because the result of capital expenditure expenditure is an increase in regional fixed assets which is a prerequisite in providing public services by local governments. The purpose of this study was to determine the effect of Capital Expenditure and Regional Original Income (PAD) on Economic Growth

This study uses quantitative and secondary data sourced from the official website of the City of Bogor using a purposive sampling method. The analytical method used is the Classical Assumption Test which consists of Normality Test, Colonierity Test, Heterescedasticity Test, and Auto Correlation Test, Multiple Linear Regression Analysis and Hypothesis Test which consists of Determination Test, F Statistical Test, and T Statistical Test, using SPSS version 25.

The results of this study indicate that Capital Expenditures and Regional Original Income (PAD) have no significant effect on Economic Growth. Simultaneous test results also state that Capital Expenditure and Regional Original Income do not have a significant effect on Economic Growth in the City of Bogor. It is hoped that this research will be useful in formulating effective and efficient strategic policies for activities towards economic growth stimulus in the city of Bogor

Keywords: Capital Expenditures, Regional Original Income (PAD), Economic Growth.

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah, dan Rihdo-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Periode 2017-2021”**

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis alami, namun berkat dukungan, dorongan dan semangat dari orang terdekat, sehingga penulis mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT telah memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Orang tua tercinta Bapak Sumargono dan Ibu Anna Wati yang telah memberikan semangat, doa, dan dorongan moril serta spiritual.
3. Adik tercintah Novia Gizza Safitri, Syafira Tiara Dewi
4. Bapak Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
6. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
7. Bapak Dr. Drs. Edy Sudaryanto, Ak., MM., CA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan-masukan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Bapak Sigit Edy Suro, Drs., MM. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan-masukan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah banyak memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat bermanfaat bagi kehidupan peneliti.
10. Para sahabat The GG terbaik saya Tia Apriani, Reza Andika P, Helmi Haryanto, Alivian, Moch Aldi, M Syamil, Moch Alwi, Gita S, Isma, Devia, Selvia Nurandini, Liza L, Hana H, Risa Septiani.
11. Teman-Teman Rumah yang ikut memberikan bantuan serta semangat kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.

12. Teman-teman kelas A Angkatan 2018 yang menemani awal semester.

13. Teman-teman satu bimbingan Bapak Edy dan Bapak Sigit yang sama-sama berjuang untuk mencapai gelar sarjana.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritikan dan saran penulis terima dengan baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, Juli 2023

M. Bagas Rudianto

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Maksud Penelitian	6
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Praktis.....	7
1.4.2 Kegunaan Akademis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Akuntansi Sektor Publik.....	8
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	8
2.2 Belanja Modal	8
2.2.1 Pengertian Belanja Modal	8
2.2.2 Indikator Belanja Modal.....	10
2.3. Pertumbuhan Ekonomi.....	11
2.3.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	11
2.3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	12
2.4. Pendapatan Asli Daerah	13
2.4.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	13
2.4.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	15
2.4.3. Jeni-Jenis Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.5. Hubungan Antara Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.6. Penelitian Sebelumnya	20

2.7. Kerangka Pemikiran.....	28
2.8. Hipotesis Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	30
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	30
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	31
3.5 Metode Penarikan Sampel.....	32
3.6 Metode Pengumpulan Data	32
3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data	32
3.7.1 Statistik Deskriptif.....	32
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	33
3.8 Pengujian Hipotesis	34
3.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	34
3.8.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	35
3.8.3 Uji Signifikan Parsial (Uji t).....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1. Sejarah Singkat Kota Bogor	37
4.1.2. Struktur Organisasi Tugas dan Wewenang	38
4.1.3. Perkembangan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor	40
4.2 Analisis Data	45
4.2.1. Uji Asumsi Klasik	45
4.2.2. Analisis Regresi Berganda.....	49
4.2.3. Uji Hipotesis	50
4.3. Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian.....	53
4.3.1. Pembahasan	53
4.3.2. Interpretasi Hasil Penelitian	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2017-2021 (Miliar)	3
Tabel 1.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2017-2021	4
Tabel 2.1 Tarif Kabupaten dan Kota.....	17
Tabel 2.2 Prinsip Penentuan Tarif Retribusi	18
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya	20
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	31
Tabel 4.1 Rasio Aktivitas Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2017-2021	48
Tabel 4.2 Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017-2021	50
Tabel 4.3 Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2017-2021	50
Tabel 4.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kota Bogor tahun 2017-2021	51
Tabel 4.5 Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	51
Tabel 4.6 Rasio Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor tahun 2017-2021	52
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorovv-Smirnov</i>	54
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolonieritas	55
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi	56
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	57
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	57
Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan Uji (F).....	59
Tabel 4.13 Hasil Uji Simultan Uji (T)	60
Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Periode 2017-2021.....	2
Gambar 1.2 Perkembangan Balanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Periode 2017-2021	5
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 3.1 Kurva Uji F.....	36
Gambar 3.2 Kurva Uji t.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bogor.....	36
Gambar 4.2 Grafik Rasio Aktivitas Belanja Modal Kota Bogor	36
Gambar 4.3 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bogor	51
Gambar 4.4 Grafik Rasio Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2017-2021	52
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas Pertumbuhan Ekonomi.....	54
Gambar 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan dan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan di setiap lapisan masyarakat. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian diperbarui kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Penetapan UU No. 23 Tahun 2014 memberi pemerintah kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat.

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dengan demikian Undang-undang tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi Belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi masa satu tahun anggaran dan menambah asset atau kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambah asset atau kekayaan daerah yang ditujukan kepada masyarakat untuk dirasakan manfaatnya berupa pembangunan infrastruktur guna mendukung pembangunan ekonomi daerah. Belanja Modal yang dilakukan pemerintah daerah antara lain pada sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi daerah.

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah keberhasilan dalam pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah

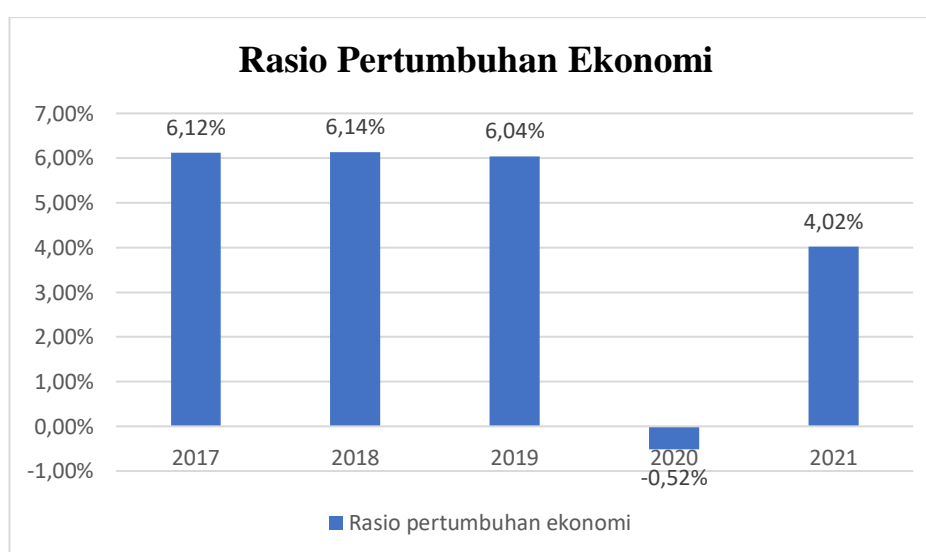
peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja modal daerah. (Pungky Ardhani, 2011:4)

Pembangunan infrastruktur daerah akan berdampak pada meningkatnya kemandirian daerah mendorong pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan meningkatkan pelayanan publik, karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya asset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. (Ummu Khoiriah, 2015:3)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Kemajuan ekonomi Kota Bogor dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tahun ke tahunnya. Dengan melihat angka pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu dari sekian perangkat indikator yang menunjukkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan di Kota Bogor.

Nilai PDRB Kota Bogor pada tahun 2020 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut disajikan gambar laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor selama periode 2017–2021 di bawah ini:



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Periode 2017-2021

Pada tahun 2017-2021 pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, meskipun mengalami fluktuasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor menunjukkan *trend positif*. Berdasarkan data tersebut, Kota Bogor Tahun 2017-2018 mengalami kenaikan sebesar 0,02% persen menjadi 6,14%. Lalu di tahun 2018-2019 Kota Bogor mengalami penurunan sebesar 0,1% persen menjadi 6,04% persen. Lalu pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan drastis sebesar 5,52% persen menjadi -0,52 persen. Dan ditahun terakhir pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar 3,5 persen menjadi 4,02 persen. Dilihat dari penjelasan tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor masih belum stabil karena terjadi kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Terlebih pada tahun 2020 dimana Indonesia memasuki masa pandemi Covid-19 bahkan mengalami resesi perekonomian.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Pertimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang, menurunnya kinerja perekonomian daerah yang berimbas pula kepada penurunan pendapatan negara terutama dari sektor pajak. Imbas kepada daerah menyebabkan menurunnya pendapatan daerah baik dari transfer dari pusat ke daerah maupun Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu perlu adanya efektifitas dan efisien pengelolaan pendapatan dan belanja daerah agar lebih terarah dan pemberian skala prioritas untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di daerah.

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan untuk investasi permanen, asset tetap, dan asset berwujud lainnya dalam menunjang kegiatan pemerintah dan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dengan belanja modal, daerah dapat melaksanakan pembangunan fasilitas, yakni dengan memfasilitasi kepentingan publik. Oleh karena itu pemerintah mampu melaksanakan pembangunannya secara maksimal.

Belanja modal di Kota Bogor mengalami perubahan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal ini dapat di lihat dari tabel 1.1 perkembangan belanja modal Kota Bogor tahun 2017-2021.

Tabel 1.1 Perkembangan Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2017-2021 (Miliar)

Tahun	Belanja Modal
2017	433,49
2018	455,46
2019	500,98
2020	276,16
2021	1.701,25

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Bogor Tahun 2017-2021.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Belanja Modal di Kota Bogor selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 belanja modal sebesar 433,49 miliar rupiah, pada tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 501,03 miliar rupiah. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 276,15 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1.701,25 triliun rupiah.

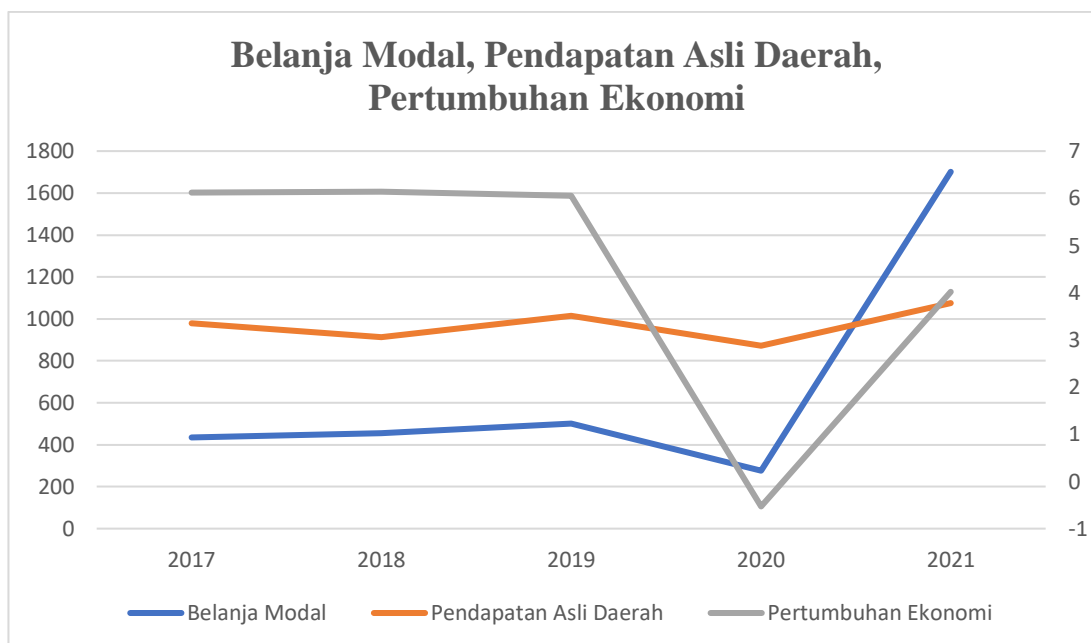
Peningkatan jumlah anggaran Belanja Modal yang terjadi di Kota Bogor terlaksana dikarenakan adanya faktor-faktor seperti tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor juga mendorong pemerintah daerah agar terus melakukan pembangunan ekonomi dengan cara mengelolah sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk dapat menciptakan lapangan kerja, yang secara langsung berpengaruh positif terhadap perkembangan kegiatan perekonomian yang ada di Kota Bogor.

Tabel 1.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2017-2021
(Miliar)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2017	978,19
2018	912,19
2019	1.015,88
2020	872,01
2021	1.075,24

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Bogor Tahun 2017-2021.

Berdasarkan pada tahun 2017 pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor sebesar 978,19. Pada tahun 2018 pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 912,19 miliar rupiah. Pada tahun 2019 pendapatan asli daerah di Kota Bogor kembali mengalami kenaikan sebesar 1.015,88 triliun rupiah. Pada tahun 2020 pendapatan asli daerah di Kota Bogor mengalami penurunan sebesar 872,01 miliar rupiah. Dan pada tahun 2021 pendapatan asli daerah kembali mengalami kenaikan sebesar 1.075,24 triliun rupiah.



Gambar 1.2 Perkembangan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Periode 2017-2021

Dapat dilihat pada gambar 1.2 diatas mengalami perubahan naik turun atau fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor paling tinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 6,14 dan paling rendah pada tahun 2020 sebesar -0,52. Pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi pada tahun 2021 sebesar 1.075,24 dan terendah pada tahun 2020 sebesar 872,01. Belanja modal di Kotab Bogor paling tinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 1.701,25 dan terendah pada tahun 2020 sebesar 276,16.

Fenomena dari penelitian ini yakni, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2018 belanja modal dan pertumbuhan ekonomu di kota bogor mengalami kenaikan sedangkan pendapatan asli daerah mengalami penurunan. pada tahun 2019 belanja modal dan pendapatan asli daerah di kota bogor secara Bersama mengalami kenaikan sedangkan pertumbuhannya mengalami penurunan.

Berdasarkan pemahaman dan fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Periode 2017-2021”**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Adanya perbedaan pengaruh kenaikan dan penurunan Belanja Modal disebabkan karena pemerintah Kota Bogor menurunkan biaya alokasi Belanja Modal.
2. Adanya perbedaan pengaruh kenaikan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), disebabkan oleh retribusi daerah hasil kekayaan daerah dan dana transfer menurun dari tahun sebelumnya. Serta adanya pandemi Covid-19 sehingga anggaran PAD diturunkan fleksibel mengikuti keadaan di Kota Bogor.
3. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor mengalami kenaikan dan penurunan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh secara partial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor periode 2017-2021?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara partial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor periode 2017-2021?
3. Apakah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor periode 2017-2021?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Dalam topik penelitian yang terdiri dari lebih satu variabel, maksud penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi secara parsial terhadap Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal serta Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan terhadap Belanja Modal, menyimpulkan hasil penelitian, serta memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan serta untuk memperoleh data yang relevan dan informasi yang akurat guna melengkapi teori yang berhubungan dengan Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Bogor periode 2017-2021.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh secara partial Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor periode 2017-2021
2. Untuk mengetahui Pengaruh secara partial Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor periode 2017-2021

3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor periode 2017-2021

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengantisipasi dan memecahkan masalah yang ada pada lokasi yang diteliti, yang dapat berguna dalam pengambilan keputusan Pemerintah Daerah dalam kebijakan terkait proporsi Anggaran Belanja Modal dengan mempertimbangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi pada umumnya dan khususnya pada Akuntansi Sektor Publik terutama dalam hal Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Pengertian Akuntansi Sektor Publik Pengertian akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu saat ada pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan pekerjaan, organisasi dan lembaga publik selalu dituntut agar pengelolaan biaya sosial dan ekonomi bisa lebih efisien. Jika tuntutan pertanggungjawaban publik oleh berbagai lembaga publik menguat, akuntansi sektor publik akan diakui sebagai ilmu untuk mengelola keuangan publik.

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Dapat dikatakan, akuntansi sektor publik bermaksud memberikan transparansi kepada publik agar hak-hak publik terpenuhi.

Pengertian Akuntansi Sektor Publik Menurut Dwi Ratmono (2015) yaitu Akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal.

2.2 Belanja Modal

2.2.1 Pengertian Belanja Modal

Belanja modal dibuat untuk menunjang kinerja pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat. Untuk menghasilkan kinerja yang produktivitas, efektif dan efisien maka dibutuhkan anggaran belanja modal yang mendukung kinerja pemerintah. Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2008 tentang Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2009 Pasal 1 ayat (14):

“Belanja Modal adalah belanja pemerintahan pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1) ;

“Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf C digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.”

Dari kedua kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Aset tetap pemerintah pada hakikatnya sama seperti aset tetap perusahaan. Namun, aset tetap pemerintah tidak semata-mata digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi aset tersebut untuk kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Mahmudi (2016) analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan Rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja terhadap total belanja daerah adalah 5-20 persen. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{Total belanja modal}} \times 100\%$$

Menurut UU Nomor : 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal tidak dapat ditujukan kepada masyarakat rumah tangga atau perorangan. Dalam hal ini Belanja Modal merupakan salah satu indikator produktif dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan atau rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan pemerintah daerah produktif. Pada umumnya dalam penggunaan aset yang dihasilkan ini sangat bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat.

Menurut pendapat yang dinyatakan oleh Badrudin (2017 : 71-72) menjelaskan bahwa belanja modal ini dilaksanakan pengkategorisasian ke dalam lima kategori atau indikator yang utama yaitu:

2.2.2 Indikator Belanja Modal

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, belanja modal dibagi menjadi :

1. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Beberapa pengeluaran publik yang dilakukan oleh Negara meliputi: Pendidikan, keamanan, kesehatan masyarakat, gaji pegawai negeri, konstruksi jalan, jembatan, selokan, saluran air, pengerasan jalan, beban kantor pemerintah, penerangan umum dan subsidi cahaya, dan gaji pegawai negeri.
2. Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contohnya meliputi : gaji, tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Adapun jenis-jenis belanja modal yang dapat dikategorikan kedalam lima kategori utama kegiatan belanja modal menurut Baldrice Siregar (2015) tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa belanja modal terbagi kedalam :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan pertaan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah

2.3. Pertumbuhan Ekonomi

2.3.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono (1998) dalam Yuliana (2014), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah. Menurut konsep teori ekonomi untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam buku ekonomi pembangunan, Patta Rapanna (2017) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dimana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi dapat juga dikatakan proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka 9 panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, dan sebagai bahan perencanaan pembangunan yang akan datang. Salah satu ukuran capaian pembangunan tersebut adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (Oktari, 2017). Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang mandiri melalui Belanja Modal yang direlaskan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik (Waskito, 2019).

Adapun menurut Syahputra (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang, dan pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini. Proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakan sebagai Modern Economic Growth. Untuk menghitung berapa besarnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka data yang diperlukan dan dipergunakan adalah Pendapatan Nasional suatu Negara. Untuk negara yang sedang berkembang umumnya menggunakan PDB, sedangkan untuk negara yang telah maju umumnya menggunakan GNP. Terdapat banyak rumus yang dipergunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, menurut Patta Rapanna (2017), indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100 \%$$

BPS (2017) mengemukakan pengertian Produk Domestik Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi yang dinyatakan dengan kenaikan output (Produk Domestik Regional Bruto) dan pendapatan riil perkapita memang bukanlah satu-satunya saran di negara-negara berkembang, namun kebijakan ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan output perlu dilakukan karena merupakan syarat penting untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung tujuan kebijakan pembangunan lainnya.

2.3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Rapanna (2017) Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang tidak lain adalah faktor produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Turun naiknya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi.

Dalam penelitian Lestari (2017) Ada empat faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara melimpahh merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan membangun dengan cepat.

b. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko dalam keidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan

orang lain. Menurut Schumpeter, seorang wiraswastawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

c. Akumulasi Modal

Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut. Investasi di bidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja. Pembentukan modal ini pula yang membawa ke arah penghematan dalam produksi skala luas dan juga membawa ke arah pnggalian sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi.

d. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil Teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktivitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi.

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa perekonomian ke arah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

Faktor ekonomi bersama-sama dengan faktor non ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu, faktor non ekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan politik juga memiliki arti penting dalam pertumbuhan ekonomi.

2.4. Pendapatan Asli Daerah

2.4.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 2 (dua) istilah pendapatan, yaitu Pendapatan Laporan Operasional dan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan Laporan Operasional adalah hak pemerintah daerah yang dapat diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran adalah semua penerimaan kas umum Negara atau Daerah yang menambah

saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, serta tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah.

Pendapatan asli daerah atau yang disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017: 23)

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu ditingkatkan agar menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Menurut Mahmudi (2016 : 89), Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat banyak rumus yang dipergunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, menurut Mahmudi (2016) dengan menggunakan indikator yang digunakan adalah Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang di anggarakan. Rumus rasio efektivitas PAD dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dan memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat Efektif : > 100%

- Efektif : 100%
- Cukup Efektif : 90-99%
- Kurang Efektif : 75%-89%
- Tidak Efektif : < 75%

Secara konseptual perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanjadaerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi pendapatan asli daerah maksimalnya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusi terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Halim, 2004).

Pendapatan daerah yang terdapat dalam APBD terdiri dari beberapa sumber pendapatan, salah satunya adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD berdasarkan UU Nomor: 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun yang menjadi sumber PAD terdiri dari

- Pajak daerah
- Retribusi daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

2.4.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :Kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

Menurut UU Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatRetribusi Daerah

b. Retribusi daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam UU No. 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan dan setiap jenis memiliki bagiannya masing-masing.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

UU Nomor : 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 yang dicabut menjadi UU Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.

2.4.3. Jeni-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi 4 jenis yaitu :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak. Penerimaan ini meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Kendaraan Diatas Air
- d. Pajak Air dibawah Tanah

- e. Pajak Air Permukaan.
2. Pajak daerah dan retribusi daerah tersusun dari:
- 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - 7) Pajak Parkir

Tabel 2.1 Tarif Kabupaten dan Kota

No	Pajak Kabupaten Dan Kota	Tarif Maksimum (%)
1	Pajak Hotel	10
2	Pajak Restoran	10
3	Pajak Hiburan	35
4	Pajak Reklame	25
5	Pajak Penerangan Jalan	10
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	20
7	Pajak Parkir	20

Sumber: UU Nomor 34 Tahun 2000

1. Sistem pengenaan pajak:
 - a) Pajak progresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana semakin tingginyadasar pajak (tax base), seperti tingkat penghasilan pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.
 - b) Pajak proporsional, yaitu sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak (%) yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya berbeda..
 - c) Pajak degresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana walau nilai atau objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil.
2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Penerimaan ini meliputi:

- a. Retribusi Umum Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain:
 - 1) Pelayanan kesehatan.
 - 2) Pelayanan kebersihan dan persampahan.
 - 3) Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil.
 - 4) Pengujian kapal perikanan.
- b. Retribusi Jasa Usaha
 - 1) Pemakaian kekayaan daerah.
 - 2) Pelayanan terminal
 - 3) Pelayanan tempat khusus parkir
 - 4) Tempat rekreasi dan olahraga
 - 5) Retribusi Perizinan Tertentu
- c. Perizinan tertentu yang retribusinya dipungut antara lain:
 - 1) Izin peruntukan penggunaan tanah
 - 2) Izin mendirikan bangunan
 - 3) Izin trayek
 - 4) Izin pengambilan hasil hutan

Tabel 2.2 Prinsip Penentuan Tarif Retribusi

No	Objek atau Jenis Retribusi Daerah	Prinsip Atau Kriteria Penentuan Tarif
1	Retirbusi Jasa Umum	1. Besarnya biaya atau penyediaan jasa yang bersangkutan 2. Kemampuan masyarakat 3. Aspek keadilan
2	Retribusi Jasa Usaha	Tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
3	Retribusi Perizinan Tertentu	Tujuan untuk menutup semua/seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan

Sumber: UU Nomor 34 Tahun 2000

3. Laba Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan UU. Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD yang disebut bagian laba BUMD, BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan (bank pembangunan daerah dan bank pasar) dan di bidang lain, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari:

- a. Hasil penjualan barang milik daerah, contoh penjualan drum bekas aspal, penjualan pohon anyaman
- b. Penerimaan jasa giro.

2.5. Hubungan Antara Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pelayanan sector publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDB. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat.

Jika pemda menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah akan meningkat pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat

produktifitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita.

2.6. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan kemudian membuat ringkasannya. Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan melalui hasil berbagai peneliti sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu juga dimaksudkan untuk membedakan penelitian sebelumnya.

Berikut akan disajikan tabel posisi penelitian terdahulu, yang berkaitan atau relevandengan penelitian penulis. Gambaran posisi penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama peneliti, tahun & Judul Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode analisis	Hasil Penelitian
1	Mutmainah (2020), Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.	Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	Belanja Tanah + Belanja Peralatan Dan Mesin + Belanja Gedung Dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan + Belanja Asset Tetap Lainnya Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah.	Kuantitatif	Pendapatan Asli daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

				PDRBt- PDRBt-1/ PDRBt-1 x 100%		
2	Rijalul Ahmad Fikri (2017), Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara	Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara	Variabel Independen: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	$PAD = PPD + PRD + HPKDD + LPS$ $BM = BT + BPM + BGB + BJIJ$ $G = PDRB1 - PDRB0 / PDRB0 \times 100\%$	Kuantitatif	Belanja modal dan Pendapatan asli daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara
3	Dewi Chrisanty Paat, Rosalina A.M.Kolean, Vekie A. Rimate (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	$PAD, DP, PE,$ Kemiskinan	Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan.
4	Megasari (2020) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	$PAD, BM,$ $PDRB,$ Indeks Pembangunan manusia, Tenaga kerja	Kuantitatif	Pendapatan Asli daerah dan Belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.
5	Wardiah (2018), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	$PAD = PD + RD + HPKD +$ Lain-lain PAD yang	Survey	Belanja Modal dan Pendapatan

	dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh	terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh	dan Belanja Modal Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	sah BM= BMT+BMPM +BMG B+ BMJIJ+BMF L Total PDRB ADHK=PDR B ADHK1 +PDRB ADHK2+ PDRB ADHK3+PDRB ADHK4 +PDRB ADHK5+ PDRB ADHK6+PDRB ADHK7 +PDRB ADHK8+ PDRB ADHK9 Total PDRB ADHK		Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
6	Sulaeman & Silvia (2019), Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia	Sulaeman & Silvia (2019), Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Regional	PAD, Transfer daerah (DAU, DBH, DAK), Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi	Kuantitatif	PAD, DAU, DBH dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan: Lokasi penelitian Periode tahun 2013-2017
7	Rori, et. Al (2018), Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel	PAD, PDRB	Ordinary Least Square (OLS) dengan metode analisis	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif atau signifikan terhadap Pertumbuhan

	terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2001- 2013	n Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2001- 2013	Dependen: Pertumbuhan Ekonomi		regresi sederhan a	Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2001 – 2013. Secara teori Apabila PAD naik, maka Pertumbuhan Ekonomi juga akan ikut naik.
8	Irmal Suandi (2016), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan	Variabel Independen: PAD dan Dana Alokasi Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	PAD, Dana Alokasi, PDRB	Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah.
9	Febriyanti (2021), Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara	Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara	Variabel Independen: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	Belanja Modal =Aset Tetap, Layanan Publik PAD = Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Pertumbuhan Ekonomi= PDRB, Kemajun	kuantitatif	Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

				teknolog, Pendapatan Rill Perkapita		
10	Rifda Atiqoh Daulay (2020), Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara	Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara	Variabel Independen: Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	BM = BT + BPM + BGB + BJIJ PAD = PPD + PRD + HPKDD + LPS G = PDRB1- PDRB0/ PDRB0 x 100%	kuantitatif	Secara simultan ada pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019.

Berikut merupakan relevansi (persamaan dan perbedaan) dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis :

1. Peneliti : Mutmainah

Judul : Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun : 2020

Universitas : Muhammadiyah Palembang

Persamaan yang digunakan:

- Variabel belanja modal
- Variabel pendapatan asli daerah
- Variabel pertumbuhan ekonomi
- Metode penelitian

Perbedaan dengan Penelitian yang akan dilakukan :

- Lokasi Penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan
- Periode tahun 2012 – 2019

2. Peneliti : Rijalul Ahmad Fikri

Judul : Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

Tahun : 2017

Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Persamaan yang digunakan :

- Variabel belanja modal
- Variabel pendapatan asli daerah
- Variabel pertumbuhan ekonomi
- Metode penelitian

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan :

- Periode tahun 2013-2015
- Lokasi penelitian di Provinsi Sumatera Utara

3. Peneliti : Dewi Chrisanty Paat, Rosalina A.M. koleangan, vekie A. Rumate

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta dampaknya terhadap kemiskinan di Kota Bitung.

Tahun : 2019

Universitas : Universitas Sam Ratulangi Manado

Persamaan yang digunakan :

- Variabel pendapatan asli daerah
- Variabel pertumbuhan ekonomi
- Metode penelitian

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan :

- Lokasi penelitian di Kota Bitung
- Periode tahun penelitian 2019

4. Peneliti : Megasari

Judul : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.

Tahun : 2020

Universitas : IAIN Palopo Sulawesi Selatan

Persamaan yang digunakan :

- Variabel pendapatan Asli Daerah
- Variabel Belanja Modal
- Variabel Pertumbuhan Ekonomi metode penelitian

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan :

-Periode tahun 2011-2019

-Lokasi penelitian di Kabupaten Luwu Utara

5. Peneliti : Wardiah

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Tahun : 2018

Universitas : Universitas Malikussaleh

Persamaan yang digunakan :

-Variabel Pendapatan Asli Daerah

-Variabel Belanja Modal

-Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan :

-Lokasi Penelitian di Provinsi Aceh

-Metode Penelitian

-Periode Tahun 2006-2009

6. Peneliti : Sulaeman dan Silvia

Judul : Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia

Tahun : 2019

Universitas : Politeknik Keuangan Negara STAN

Persamaan yang digunakan :

-Variabel Pendapatan Asli Daerah

-Variabel Belanja Modal

-Variabel Pertumbuhan Ekonomi

- Metode Penelitian

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan :

-Metode Penelitian

-Periode Tahun 2013-2017

7. Peneliti : Rori, et.Al

Judul : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2001-
2013

Tahun : 2018

Universitas : Universitas Sam Ratulangi Manado

Persamaan yang digunakan :

-Variabel Pendapatan Asli Daerah

-Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan :

-Metode Penelitian di Sulawesi Utara

-Periode Tahun 2001-2013

8. Peneliti : Irmal Suandi

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun : 2016

Universitas : Universitas Negeri Makasar

Persamaan yang digunakan :

-Variabel Pendapatan Asli Daerah

-Variabel Pertumbuhan Ekonomi

- Metode Penelitian

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan :

-Metode Penelitian di Sulawesi Selatan

-Periode Tahun 2008-2013

9. Peneliti : Febriyanti

Judul : Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

Tahun : 2021

Universitas : Universitas Negeri Makasar

Persamaan yang digunakan :

-Variabel Pendapatan Asli Daerah

-Variabel Pertumbuhan Ekonomi

- Metode Penelitian

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan :

-Metode Penelitian di Sulawesi Selatan

-Periode Tahun 2016

10. Peneliti : Rifda Atiqoh Daulay

Judul : Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

Tahun : 2020

Universitas : Universitas UIN Sumatera Utara

Persamaan yang digunakan :

-Variabel Pendapatan Asli Daerah

-Variabel Pertumbuhan Ekonomi

-Variabel Belanja Modal

- Metode Penelitian

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan :

-Metode Penelitian di Sulawesi Utara

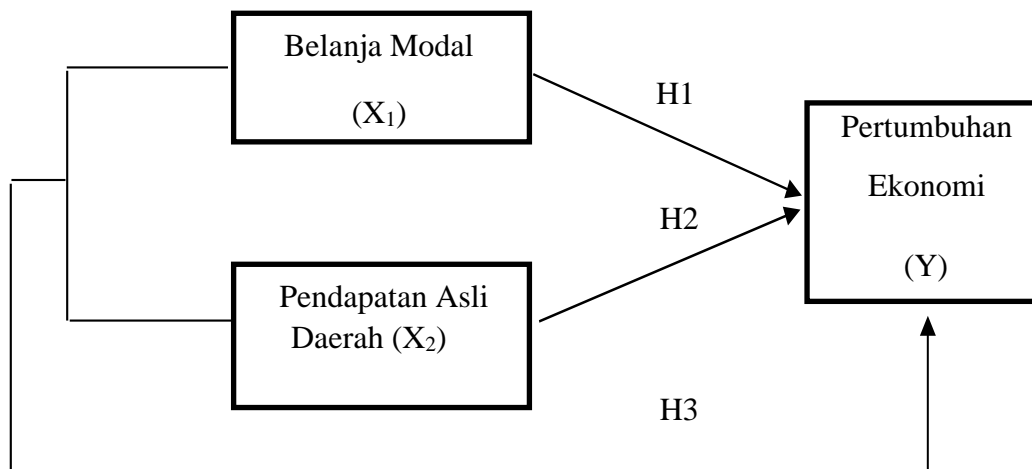
-Periode Tahun 2016-19

2.7. Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini dijelaskan dan digambarkan pada gambar 2.1 kerangka pemikiran dari penelitian ini. Kerangka pemikiran penelitian menunjukkan adanya hubungan antara belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiscal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dokumen anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional (Arini S, 2016). Sementara belanja modal adalah bagian dari belanja pemerintah yang termasuk dalam APBN atau APBD dengan tujuan kepentingan masyarakat. sehingga berdasarkan penelitian (Arini S, 2016) bahwa belanja modal memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang paling berkontribusi untuk menunjang pembangunan daerah dalam rangka desentralisasi. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (Kusumawati & Wiksuana, 2018)

Dari data penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang berupa suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dikembangkan untuk maksud pengujian. Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Diduga Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2017-2021

Hipotesis 2 : Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2021

Hipotesis 3 : Diduga Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2017-2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif, penelitian ini bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil dari penelitian terdahulu, sehingga dapat diperoleh suatu hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini juga menggunakan metode *Explanatory Survey* yang bertujuan untuk menguji hipotesis atau pada umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, adapun hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk angka maupun rasio pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen yang diolah oleh aplikasi SPSS.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 38), objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai *Independent Variable* (Variabel Independen) dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai *Dependent Variable* (Variabel Dependen).

Unit Analisis Penelitian yang digunakan adalah *Geographic Region* (Geografis Regional) maksud dari geografis regional yang diteliti adalah daerah, sehingga data yang digunakan mengenai atau berasal dari (respon) suatu daerah tertentu. Lokasi penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Bogor.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan oleh peneliti ialah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Sedangkan sumber data penelitian yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan (Sugiyono, 2016: 225).

Data sekunder diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id), sedangkan data Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Kota Bogor (<https://bogorkota.bps.go.id/>).

3.4. Operasionalisasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas (Independent Variabel) (X)

Variabel bebas (Independent variabel) adalah variabel yang dianggap berpengaruh terhadap variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini diantaranya :

X1 = Belanja Modal

X2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) (Y)

Variabel dependen (Dependent variabel) merupakan variabel yang tergantung atau dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Sehingga yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Alokasi pada Belanja Modal. Pengertian mengenai Belanja Modal telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Belanja Modal (X1)	Rasio Aktivitas Belanja Modal	$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Modal}} \times 100\%$	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2)	Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$	Rasio
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Rasio Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$	Rasio

Sumber: Mahmudi, 2016.

3.5 Metode Penarikan Sampel

Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi adalah sampel. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, dan sampel adalah bagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel penelitian ini ditentukan secara purposive sampling.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2017-2021.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dihimpun adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data yang dihimpun adalah data belanja modal, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi.

Semua data diperoleh dengan cara melihat dan menganalisis data dari website Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (www.djpk.depkeu.go.id), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor (<https://bogorkota.bps.go.id/>), dimana kumpulan data dari laporan anggaran pemerintah pada periode 2017 sampai dengan tahun 2021.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013:206) mendefinisikan analisis data sebagai berikut:

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Analisis kuantitatif ditekankan untuk mengungkapkan perilaku variabel penelitian. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai metode analisis tersebut:

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Pengujian statistik deskriptif ini menggunakan *software statistical product and service solution* (SPSS). Pengujian statistik menggunakan SPSS dilakukan untuk memperoleh hasil dari korelasi *person* dan signifikansi, melakukan

perhitungan dari analisis regresi linier, statistik deskriptif, perhitungan uji t dan uji F yang digunakan untuk membandingkan hasil hubungan antar variabel.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Sebuah model regresi yang baik adalah model dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin. Oleh karena itu, sebuah model haruslah memenuhi beberapa asumsi sebelum digunakan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, mengetahui ada tidaknya normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi pada model regresi. Harus terpenuhinya asumsi klasik karena agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak biasa dan pengujian dapat dipercaya. Berikut ini merupakan uji asumsi klasik:

3. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi normal atau tidak normal dan biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval ataupun rasio. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal atau menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, dengan kriteria jika signifikan $> 0,05$ maka data terdistribusi normal dan jika signifikansi $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis grafik yang dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan/tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2018).

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) adalah jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka variabel berdistribusi normal dan jika probabilitas kurang dari 0,05 maka variabel tidak berdistribusi normal.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya kesamaan variabel dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik adalah heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji heteroskedastisitas yaitu uji glesjer dengan melihat pola titik-titik pada *scatterplots* regresi dan uji koefisien korelasi *spearman's rho* dengan mengkorelasikan variabel independent dengan nilai residual.

Kriteria pengujian *spearman's rho* menggunakan tingkat 5% (0,05) dengan uji 2 sisi:

- a. Jika korelasi antar variabel independent dengan residual didapat signifikan $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
 - b. Jika korelasi antar variabel independen dengan residual didapat signifikan $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
5. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Jika ada variabel independent yang terkena multikolinieritas variabel independen itu harus dikeluarkan dari model penelitian. Model regresi yang baik merupakan model regresi yang terbatas dari masalah multikolinieritas.

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Jika output regresi memiliki nilai *tolerance* $< 0,1$ atau nilai VIF > 10 maka output regresi tersebut terjadi multikolinieritas.
- b. Jika output regresi memiliki nilai *tolerance* $> 0,1$ atau nilai VIF < 10 maka output regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh atau hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen lebih dari satu. Model persamaan regresi linier berganda yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + X_2 + \beta_2 + X + e$$

Di mana:

Y : Variabel Pertumbuhan Ekonomi

α : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi untuk Belanja Modal

X_1 : Belanja Modal

β_2 : Koefisien regresi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

e : *Error*

3.8 Pengujian Hipotesis

3.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen atau

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 mendekati satu maka kemampuan variabel-variabel independen secara sempurna dapat menjelaskan variabel dependen..

3.8.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama (simultan) digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Pendapatan Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak terhadap Alokasi Belanja Modal secara simultan dan parsial. Menurut Sugiyono (2014, 257) dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota data atau kasus

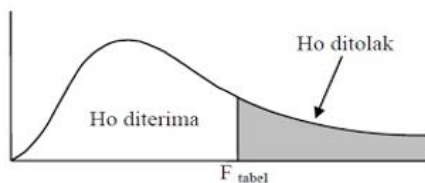
F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan F_{tabel} yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5% atau dengan *degree freedom* = $k(n-k-1)$ dengan kriteria sebagai berikut:

- H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$
- H_0 diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai $sig > \alpha$

Jika terjadi penerimaan H_0 , maka dapat diartikan tidak berpengaruh signifikan model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Adapun yang menjadi hipotesis nol H_0 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$: tidak berpengaruh signifikan
- $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$: tidak berpengaruh signifikan

Kurva Uji F

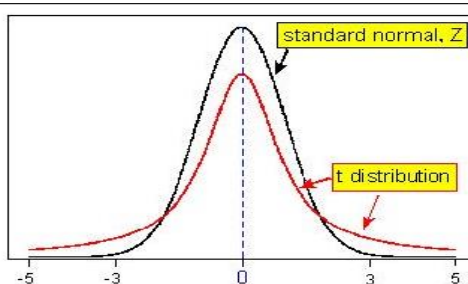


Gambar 3.1 Kurva Uji F

3.8.3 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Cara pengujian parsial terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Jika signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} , maka ada pengaruh secara parsial antar variabel independent dengan variabel dependen.
- Jika signifikansi lebih dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} , maka tidak ada pengaruh secara parsial antar variabel independent dengan variabel dependen.



Gambar 3.2 Kurva Uji t

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017-2021. Pemerintah Kota Bogor yang menjadi sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan berbagai pertimbangan yang telah ditentukan sebagai mana telah dijelaskan dalam BAB III.

4.1.1. Sejarah Singkat Kota Bogor

Kota Bogor mempunyai sejarah yang panjang dalam pemerintahan, mengingat sejak zaman Kerajaan Pajajaran sesuai dengan bukti-bukti yang ada antara lain Prasasti Batu Tulis. Penduduk Bogor mempunyai keyakinan bahwa Kota Bogor mempunyai hubungan lokatif dengan Kota Pakuan, Ibukota Pajajaran. Asal-usul dan arti Pakuan terdapat dalam berbagai sumber berdasarkan urutan waktu seperti terdapat pada Naskah Carita Waruga Guru (1750-an). Dalam naskah berbahasa Sunda Kuna ini diterangkan bahwa nama Pakuan Pajajaran didasarkan bahwa di lokasi tersebut banyak terdapat pohon Pakujajar, Menurut R. Ng. Poerbatjaraka (1921) Dalam tulisan De Batoe-Toelis bij Buitenzorg (Batutulis dekat Bogor) ia menjelaskan bahwa kata “Pakuan” mestinya berasal dari bahasa Jawa kuno “pakwwan” yang kemudian dieja “pakwan” (satu “w”, ini tertulis pada Prasasti Batutulis). Dalam lidah orang Sunda kata itu akan diucapkan “pakuan”. Kata “pakwan” berarti kemah atau istana. Jadi, Pakuan Pajajaran, menurut Poerbatjaraka, berarti “istana yang berjajar”(aanrijen staande hoven). Sebutan “Pakuan”, “Pajajaran”, dan “Pakuan Pajajaran” dapat ditemukan dalam Prasasti Batutulis (nomor 1 & 2) sedangkan nomor 3 bisa dijumpai pada Prasasti Kebantenan di Bekasi.

Bogor berasal dari kata “buitnezorg” nama resmi dari penjajah Belanda selain itu terdapat pula kata “Bahai” yang berarti sapi, yang kebetulan ada patung sapi di Kebun Raya Bogor. Sedangkan pendapat ketiga menyebutkan Bogor berasal dari kata “Bokor” yang berarti tunggul pohon enau (kawung) dan terdapat pula dokumen pada tanggal 7 April 1952 menuliskan “Hoofd Van de Negori Bogor” yang berarti kurang lebih Kepala Kampung Bogor. Pada saat Indonesia merdeka atau telah mendapat pengakuan kedaulatan RI, Pemerintah Kota Bogor namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Selanjutnya pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1957, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965

Kota Bogor terletak di antara 106° 48' BT dan 6° 26' LS. Memiliki rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut dan curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500-4000 mm membuat kota bogor memiliki rata-rata suhu tiap bulan 26°C dengan suhu terendah 21,8°C dan suhu tertinggi 30,4°C. Luas wilayah kota bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian Secara Administratif kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT. Kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.

4.1.2. Struktur Organisasi Tugas dan Wewenang

A. Visi Pemerintahan Kota Bogor

Visi adalah rumusan umum mengenai suatu keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi maka segala sumberdaya dapat terarah, guna mewujudkannya dilaksanakannya melalui serangkaian kegiatan dan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Visi Daerah Kota Bogor yaitu “Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan profesional sebagai pendukung utama pemerintah daerah”

B. Misi Pemerintah Kota Bogor

Dalam rangka pencapaian visi diatas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka di tetapkan 2 (dua) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah dan
2. Mengikatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pemaknaan tiga kata kunci yang terdapat pada misi diatas secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

- a) Akuntabel adalah instrumen yang menunjukkan apakah prinsip-prinsip pemerintah, hukum atau keterbukaan, transparan, keberpihakan dan kesamaan di hadapan hukum telah dihargai atau tidak. Akuntabel adalah hal penting untuk menjamin nilai seperti efisien, efektifitas, reliabilitas (terukur) dan predictabilities dari administrasi publik. Suatu akuntabel tidak abstrak tapi konkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus ditanggung jawabkan.
- b) Profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi data suatu pekerjaan tertentu. Profesional tidak berarti ahli saja. Namun selain memiliki keahlian juga harus berkerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya

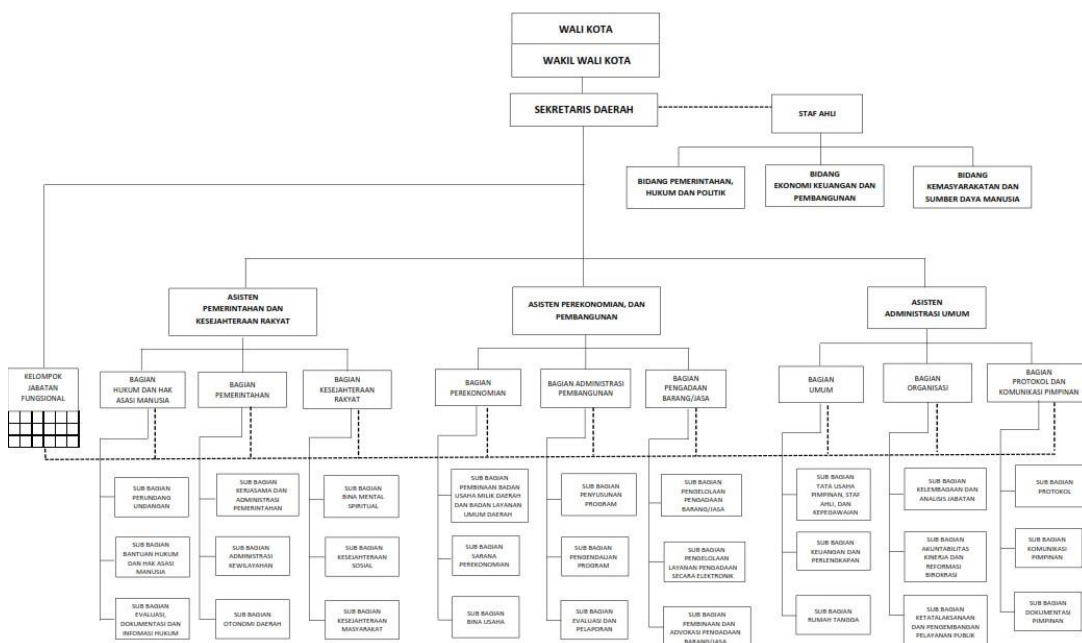
tersebut. Seorang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu seorang profesional juga harus selalu melakukan inovasi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya.

- c) Pendukung Utama Pemerintah Daerah adalah BPKAD merupakan lembaga berperan sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

C. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bogor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat dan juga pada hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut bagan struktur organisasi Kota Bogor.

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bogor selengkapnya disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 4.1 – Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bogor

4.1.3. Perkembangan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor. Data-data dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Belanja Modal Kota Bogor

Belanja Modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Perolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang. Belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah.

Selain itu, untuk melihat tingkat perkembangan belanja modal dengan menggunakan rasio aktivitas belanja modal (Mahmudi,2014.). Rasio pertumbuhan ini mengukur seberapa besar pengetahuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Ukuran Rasio Aktivitas Belanja Modal sebagai berikut:

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

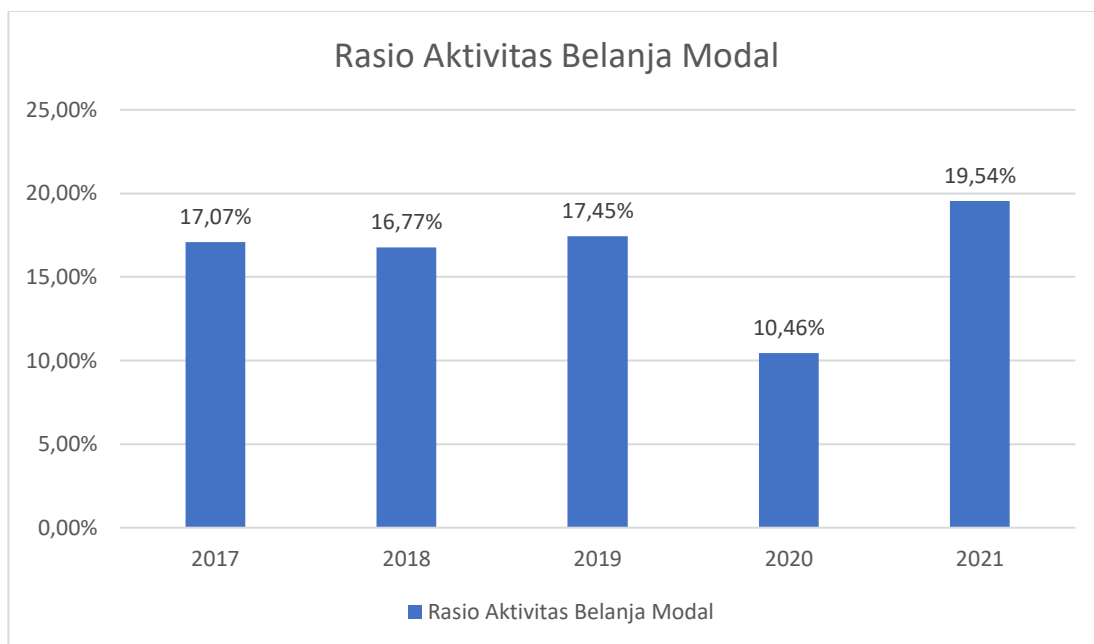
Sumber: Mahmudi, 2014

Berdasarkan perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Modal diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rasio Aktivitas Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2017-2021 (miliar)

Tahun	Realisasi belanja modal	Total realisasi belanja daerah	Rasio aktivitas belanja modal
2017	433,49	2.597,46	16,69%
2018	455,46	2.656,28	17,15%
2019	500,98	2.871,22	17,45%
2020	276,16	2.641,03	10,46%
2021	1.701,25	8.708,39	19,54%

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id



Gambar 4.3 Grafik Rasio Aktivitas Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2017-2021

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id data diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.2 dapat di lihat bahwa rasio aktivitas belanja modal di kota bogor tahun 2017-2021 cenderung berfluktuatif setiap tahun nya. Rasio aktivitas belanja modal pemerintah Kota Bogor pada tahun 2017 sebesar 16,69%, dan mengalami kenaikan di tahun 2018 dan di tahun 2019. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan sebesar 17,15%, dan 17,45%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10,46%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 19,54%. Ada beberapa penyebab rasio aktivitas belanja modal di tahun 2020 mengalami penurunan. Belanja modal pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 224,88M hal ini di sebabkan karena pemerintah kota bogor menurunkan biaya alokasi belanja modal. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 sehingga anggaran belanja modal dan belanja daerah di turunkan flexibel mengikuti keadaan di kota Bogor.

B. Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor

Pendapatan asli daerah adalah pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang di peroleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 285 ayat (1)

Tabel 4.2 Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017-2021(Miliar)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Transfer	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Pendapatan Daerah
2017	978,19	1.072,49	238,68	2.289,37
2018	912,19	1.066,76	349,74	2.238,70
2019	1.015,88	1.106,49	437,48	2.559,85
2020	872,01	1.112,10	444,46	2.428,58
2021	1.075,24	1.070,12	214,51	2.644,78

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id

Tabel 4.3 Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2017-2021 (Miliar)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah				
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	Total PAD
2017	555,48	49,04	29,95	343,73	978,19
2018	592,98	48,42	26,77	244,03	912,19
2019	689,54	51,36	28,24	246,74	1.015,88
2020	509	35,01	31,93	296	872,01
2021	624,78	36,03	32,42	382	1.075,24

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id

Rasio Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlakukan daerah (Halim, 2012). Semakin tinggi rasio kemandirian, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitupula sebaliknya (Hamzah, 2008). Menurut Mahsun (2016), rasio kemandirian digunakan untuk lebih memahami seberapa besar tingkat kemandirian dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerahnya. Rasio dapat diukur dengan cara membandingkan pendapatan asli daerah dengan transfer pemerintah pusat dan daerah serta pinjaman daerah. Ukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebagai berikut:

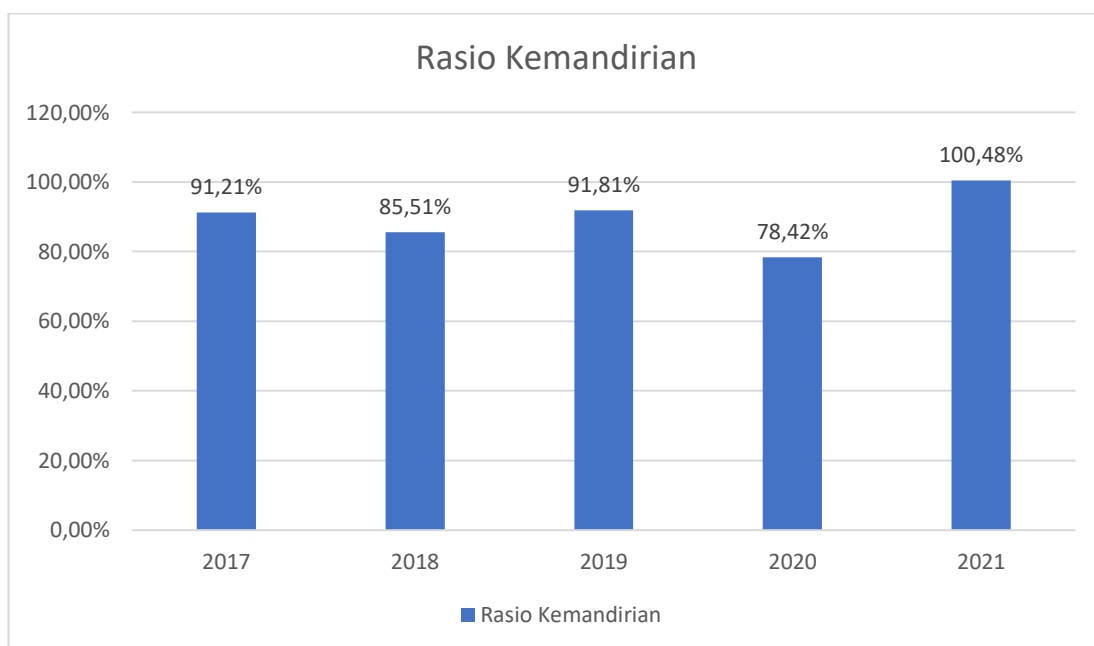
$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{realisasi pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Dana Transfer+pinjaman}} \times 100$$

Sumber: Mahmudi,2014

Berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kota Bogor tahun 2017-2021 (miliar)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Transfer	Pinjaman	Rasio Kemandirian
2017	978,20	1.072,49	-	91,21%
2018	912,20	1.066,76	-	85,51%
2019	1.015,88	1.106,49	-	91,81%
2020	872,07	1.112,10	-	78,41%
2021	1.075,24	1.070,12	-	100,48%



Gambar 4.3 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bogor Tahun 2017-2021

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id

Tabel 4.5 Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan	Rasio kemandirian
Rendah sekali	0>25%
Rendah	>25%-50%
Sedang	>50%-75%
Tinggi	>75%-100%

Sumber mahmudi 2014

Berdasarkan tabel 4.4 dan gambar 4.2 di atas, rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah kota Bogor tahun 2017 91,21% dan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 85,51%. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 91,81% sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 78,41%. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 100,48%. Maka bisa di lihat pada tabel 4.5 mengenai skala interval rasio kemandirian keuangan daerah dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2017-2021 kemampuan keuangan daerah masuk ke dalam kategori tinggi.

C. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Untuk melihat kemajuan perekonomian dengan melihat nilai dari produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jadi PDRB merupakan alat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari perkembangan suatu perekonomian di daerah. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang meningkat. Ukuran rasio pertumbuhan ekonomi :

$$G = \frac{PDRB1 - PDRB0}{PDRB0} \times 100$$

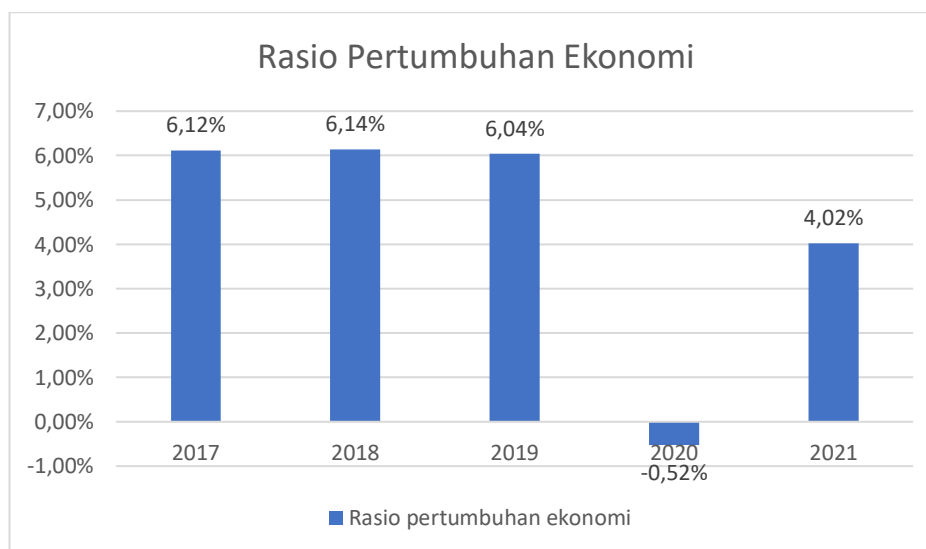
Sumber: Mahmudi 2014

Berdasarkan perhitungan Rasio Pertumbuhan Ekonomi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rasio pertumbuhan ekonomi kota bogor tahun 2017-2021

Tahun	PDRB atas dasar harga konstan	Rasio pertumbuhan ekonomi
2017	286,54	6,12%
2018	304,13	6,14%
2019	322,50	6,05%
2020	320,83	-0,53%
2021	333,72	4,02%

Sumber: Badan pusat statistik (BPS)



Gambar 4.4 Grafik Rasio Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2017-2021

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id

Berdasarkan tabel 4.6 dan gambar 4.4 diatas, rasio pertumbuhan ekonomi kota Bogor tahun 2017-2021 cenderung tidak stabil setiap tahun nya. Rasio pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 6,12% sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,14%. Pada tahun 2019 di Kota Bogor mengalami penurunan

sebesar 6,04% sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -0,52% hal tersebut diakibatkan oleh beberapa lapangan usaha seperti industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran seperti reparasi mobil dan sepeda dan jasa lainnya mengalami penurunan pada laporan laju pertumbuhan PDRB kota Bogor atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha sehingga menyebabkan nilai PDRB pada tahun 2020 menurun secara drastis dan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan resesi ekonomi di kota Bogor.

4.2 Analisis Data

Analisis Data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data dari variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor yaitu dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 25.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya (variabel dependen) adalah Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor, sedangkan variabel bebasnya (variabel independen) adalah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, maka dilakukan uji asumsi klasik sebagai berikut:

4.2.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah salah satu syarat dalam menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun cara yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak maka dilakukan pengujian dengan Kolmogorow- Smiwow.

Adapun dasar pengambilan uji Kolmogorow-Smiwow yaitu:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorovv-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.12258774
Most Extreme Differences	Absolute	.207
	Positive	.207
	Negative	-.154
Test Statistic		.207
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

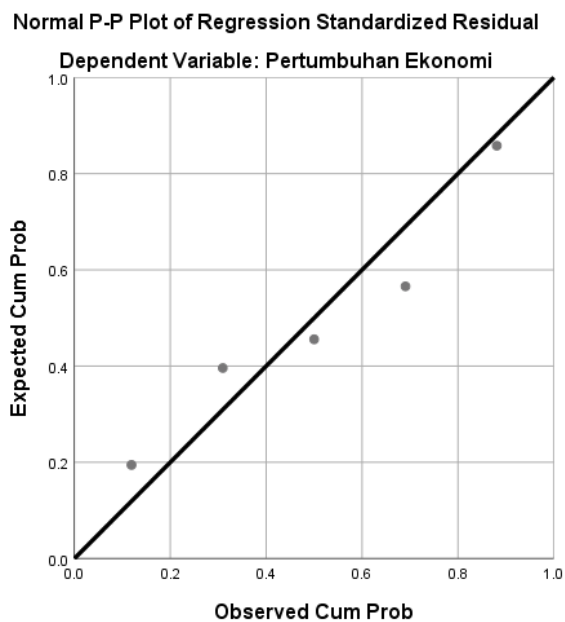
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil pengelolaan data SPSS 25 (2023)



Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil pengelolaan data SPSS 25 (2023)

Dari tabel 4.7 dapat diketahui tingkat signifikan adalah 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Pada gambar 4.5 terlihat bahwa plotting (titik-titik) yang menggambarkan data mengikuti atau tersebar mengikuti garis diagonal. Maka dari itu model regresi berdistribusi dinyatakan normal.

2. Uji Multikolonieritas

uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah variabel regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen salah satu cara untuk mengetahui ada tidak nya multikolonieritas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai Tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*) model regresi yang baik tidak terjadi gejala multikolonieritas, jika nilai tolerance $> 0,100$ dari $VIF < 10,000$ (Ghozali,2018).

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolonieritas

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 25 (2023)

Dari Uji Multikolonieritas diatas nilai *tolerance* untuk variabel Belanja Modal dan

Coefficients^a

Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Sig.	Collinearity Statistics				
			Tolerance	VIF			
B	Std. Error	Beta					
(Constant)	-31.330	27.606		-1.135	.374		
Belanja Modal	-.004	.004	-.813	-.942	.446	.365	2.742
Pendapatan Asli Daerah	.040	.031	1.112	1.288	.327	.365	2.742

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah masing-masing sebesar 0,948 maka variabel independen lebih besar 0,100 ($0,948 > 0,100$) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah masing-masing sebesar 1.055 maka variabel independen lebih kecil dari 10,000 ($1.055 < 10,000$). Hal ini dinyatakan tidak ada gejala multikolonieritas.

3. Uji Autokolerasi

Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Cara yang digunakan untuk melihat ada tidaknya autokorelasi pada penelitian ini yaitu menggunakan uji runs test. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji runs test, yaitu:

- 1) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) $<$ dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi.
- 2) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) $>$ dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi

Tabel 4.9 Hasil Uji Autokolerasi

Runs Test

	Unstandardize d Residual
Test Value ^a	-.33452
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	3
Total Cases	5
Number of Runs	3
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

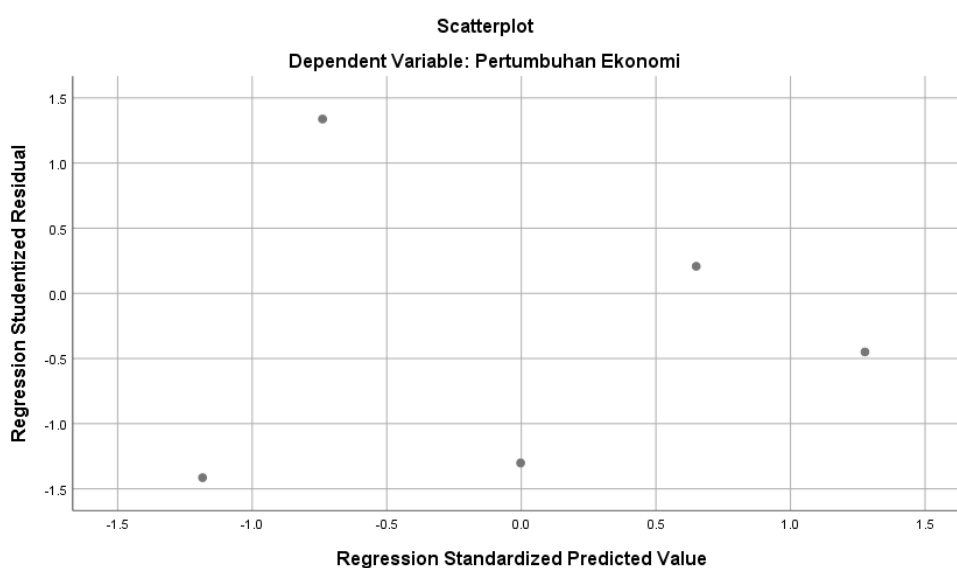
Sumber: Hasil pengolahan SPSS 25 (2023)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar $1.000 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat gejala atau masalah autokolerasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilihat dengan menggunakan uji scatterplot. Dengan kriteria pengujian yaitu apabila penyebaran titik-titik data tidak berpola, titik-titik data menyebar diatas dan dibawah dan titik-titik data tidak mengumpul maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas

Gambar 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil pengolahan SPSS 25(2023)

Berdasarkan dari gambar 4.2 di atas hasil uji heteroskeditas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga layak dipakai dalam penelitian.

4.2.2. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah serta variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor. Untuk melihat ada tidaknya pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel terikat maka dapat dilakukan pengujian model regresi berganda dengan bantuan SPSS 25.

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics			
	B	Std. Error	Beta	Sig.	Tolerance	VIF	
(Constant)	-31.330	27.606			-1.135	.374	
Belanja Modal	-.004	.004	.813		-.942	.446	2.742
Pendapatan Asli Daerah	.040	.031	1.112		1.288	.327	2.742

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: hasil pengolahan SPSS 25(2023)

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji regresi berganda dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = -31.330 + 0.004 \text{ Belanja Modal} + 0.040 \text{ PAD}$$

Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar -31.330 artinya apabila semua variabel independen yaitu Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan (bernilai 0) maka Pertumbuhan Ekonomi bernilai sebesar -31.330

b. Koefisien regresi variabel Belanja Modal sebesar 0.004 artinya apabila Belanja Modal naik sebesar 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi akan naik sebesar 0.004 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

c. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.040 artinya apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan sebesar 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi akan naik sebesar 0.040 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

4.2.3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dalam penelitian. Uji hipotesis terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R² mempunyai interval antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai R² (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut.

Koefisien determinasi (R²) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independent dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka koefisien determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independent memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R²) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi dependen adalah terbatas. Berikut hasil pengujian statistiknya:

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.676 ^a	.456	-.087	3.00179

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal

sudb. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: hasil pengolahan SPSS 25 (2023)

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square adalah -0.087. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu mempengaruhi atau menjelaskan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan atau bersama-sama sebesar -8,7% sisanya sebesar 108,7% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Jika nilai Adjusted R Square semakin mendekati 1 menunjukkan variabel-variabel independent semakin baik untuk memprediksi variabel dependen, Dengan demikian masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain belanja modal dan pendapatan asli daerah.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji koefisien regresi secara simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen secara simultan. Jika nilai sig < 0,05 dan F hitung > F tabel, maka artinya variabel independent (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Hasil pengolahan data sebagai berikut:

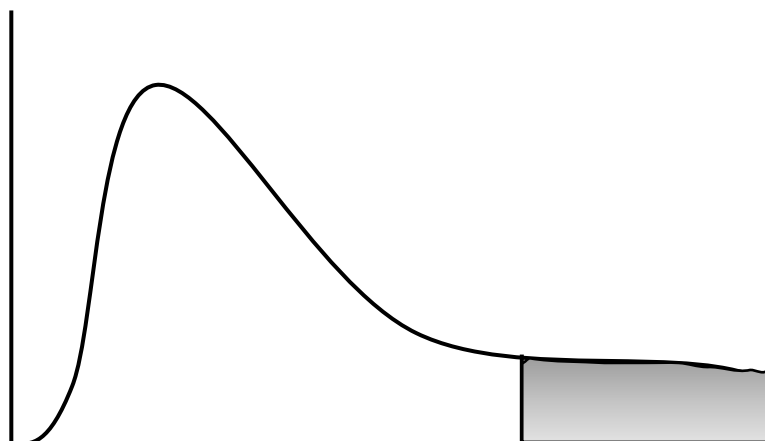
Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan Uji (F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15.128	2	7.564	.839	.544 ^b
	Residual	18.022	2	9.011		
	Total	33.150	4			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 25 (2023)



Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 4.12 dapat dilihat hasil perhitungan dengan nilai F hitung sebesar 0,839 dengan nilai signifikansi sebesar 0.544 sedangkan nilai F tabel sebesar 19,00. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung > F tabel (0,839 < 19,00) artinya secara bersama-sama variabel independent (X) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

3. Uji Parsial (Uji t)

Uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 0,05 dibagi 2 sisi menjadi 0,025 jika nilai Sig < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel maka artinya variabel independen (X) secara

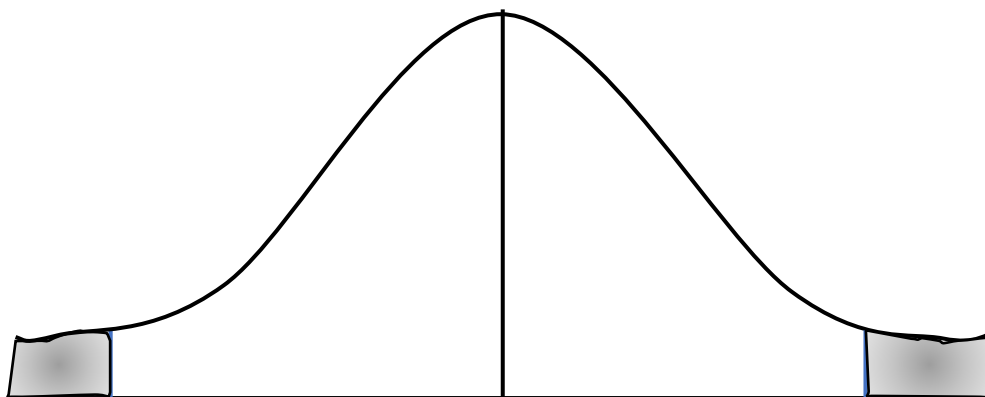
parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Hasil pengolahan data sebagai berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial (Uji T)

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-31.330	27.606		-1.135	.374		
	Belanja Modal	-.004	.004	-.813	-.942	.446	.365	2.742
	Pendapatan Asli Daerah	.040	.031	1.112	1.288	.327	.365	2.742

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 25 (2023)



Berdasarkan Hasil Uji Parsial (Uji t) pada tabel 4.13 dapat disimpulkan:

1) Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai t hitung Belanja Modal (X1) sebesar -0,942 dengan signifikansi 0,446 > 0,05. Hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel (0,025:5) adalah 2,776 maka nilai t hitung > t tabel (0,446

$< 2,776$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai t hitung Pendapatan Asli Daerah (X2) sebesar 1,288 dengan signifikansi $0,327 > 0,05$. Hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel ($0,025:5$) adalah 2,776 maka t hitung $< t$ tabel ($1,288 < 2,776$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

4.3. Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian

4.3.1. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor, maka dapat dilakukan pembahasan dan interpretasi sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil Uji Hipotesis
H1	Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor tahun 2017-2021	Ditolak
H2	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor tahun 2017-2021	Ditolak
H3	Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara silmutan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor tahun 2017-2021	Ditolak

Tabel 4.14 diatas menjelaskan mengenai hasil dari hipotesis penelitian sehingga menghasilkan hipotesis yang diterima atau ditolak.

1. H1: Ditolak

Variabel Belanja Modal (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Terlihat bahwa variabel belanja modal (X1) memiliki nilai Sig 0,446 lebih dari taraf nyata 0,05. Hal ini sesuai dengan pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel ($0,025:5$) adalah 2,776 maka nilai t hitung $> t$ tabel ($0,446 < 2,776$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Tidak berpengaruhnya belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan terjadinya pengalihan sebagian besar belanja modal kepenanggulangan pandemi Covid 19 dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang berdampak.

2. H2: Ditolak

Variabel Pendapatan Asli Daerah (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Terlihat bahwa variabel pendapatan asli daerah (X2) memiliki nilai Sig 0,327 lebih dari taraf nyata 0,05. Hal ini sesuai dengan pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel (0,025:5) adalah 2,776 maka $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($1,288 < 2,776$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Tidak berpengaruhnya Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya penurunan pendapatan dari hotel dan restoran serta pusat pembelajaran lain akibat adanya pembatasan untuk melakukan perjalanan hal tersebut berakibat menurunnya pendapatan daerah berupa pajak Pajak Daerah dan Restribusi daerah.

3. H3: Ditolak

Variabel Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 4.12 dapat dilihat hasil perhitungan dengan nilai F hitung sebesar 0,839 dengan nilai signifikansi sebesar 0.544 sedangkan nilai F tabel sebesar 19,00. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung $> F \text{ tabel}$ ($0,839 < 19,00$) artinya secara bersama-sama variabel independent (X) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

4.3.2. Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya pengujian hipotesis dan statistik oleh peneliti pada Pemerintah Kota Bogor periode 2017-2021 yang menggunakan alat bantu SPSS versi 25 tentang Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi maka dapat dilakukan interpretasi hasil sebagai berikut:

A. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa perhitungan rasio aktivitas belanja modal Pemerintah Kota Bogor menunjukkan presentase yang belum stabil karena data menunjukkan fluktuasi (naik turun). Rasio aktivitas belanja modal pemerintah Kota Bogor pada tahun 2017 sebesar 16,69%, dan mengalami kenaikan di tahun 2018 dan di tahun 2019. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan sebesar 17,15%, dan 17,45%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10,46%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 19,54%.

Hasil pengujian uji parsial (Uji t) Belanja Modal (X1), hasil perhitungan yang di dapat adalah nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas signifikansi yaitu $0,446 > 0,05$ maka belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel menunjukkan bahwa $t \text{-hitung} > t \text{-tabel}$ (t-hitung (0,025:5) adalah 2,776 maka nilai t hitung $> t \text{ tabel}$ ($0,446 < 2,776$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Y.

Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Mutmainah (2020), dalam judul penelitiannya Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan metode penelitian

kuantitatif dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Bogor menunjukkan presentase yang belum stabil karena data menunjukkan fluktuasi (naik turun). Pada tabel 4.5 mengenai skala interval rasio kemandirian keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 91,21% dan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 85,51% disebabkan oleh Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah dan Dana Transfer menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 91,81% sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 78,41% karena adanya pandemi covid-19 sehingga anggaran PAD diturunkan fleksibel mengikuti keadaan di Kota Bogor sehingga Pemerintah Kota Bogor memerlukan pengoptimalkan agar dapat terus melampaui dari target yang dianggarkan dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 100,48%.

Hasil pengujian uji parsial (Uji t) Pendapatan Asli Daerah (X2), hasil perhitungan yang di dapat adalah nilai signifikansi lebih besar dari probabilitas signifikansi yaitu $0,446 > 0,05$ maka pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel menunjukkan bahwa t-hitung $>$ t-tabel ($1,288 < 2,776$) maka hipotesis kedua ditolak. Dengan ini menunjukkan bahwa tingkat PAD pada Pemerintah Kota Bogor tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menjadi indikasi bahwa terpengaruhnya PAD dan Pertumbuhan Ekonomi atas dampak dari pandemic Covid-19 yang sedang melanda di seluruh dunia khususnya Kota Bogor ini. Tidak berpengaruhnya Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya penurunan pendapatan dari hotel dan restoran serta pusat pembelajaran lain akibat adanya pembatasan untuk melakukan perjalanan hal tersebut berakibat menurunnya pendapatan daerah berupa pajak Pajak Daerah dan Restribusi daerah

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian dari Rijalul Ahmad Fikri (2017), dalam judul penelitian nya Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dengan metode penelitian kuantitaif dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara.

C. Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, karena berdasarkan analisis uji F dapat dilihat bahwa F hitung sebesar 0,839

dengan nilai signifikansi sebesar 0,544 sedangkan nilai F tabel sebesar 19,00. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung $>$ F tabel ($0,839 < 0,544$) artinya secara bersama-sama variabel independent (X) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) variabel independen memiliki $\text{sig} > 0,05$ yakni 0,544 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Tidak berpengaruhnya belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan terjadinya pengalihan sebagian besar belanja modal kepenanggulangan pandemi Covid 19 dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang berdampak.

Hasil dari Adjusted R Square sebesar -8,7% menjelaskan bahwa variabel belanja modal dan pendapatan asli daerah dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebesar -8,7% dan 108,7%% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk didalam penelitian ini, hal ini berarti variabel belanja modal dan pendapatan asli daerah tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian dari Rijalul Ahmad Fikri (2017), dalam judul penelitiannya Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dengan metode penelitian kuantitatif dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2017-2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi karena memiliki nilai Sig 0,446 lebih dari taraf nyata 0,05. Hal ini sesuai dengan pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel (0,025:5) adalah 2,776 maka nilai t hitung > t tabel (0,446 < 2,776). Tidak berpengaruhnya belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan terjadinya pengalihan sebagian besar belanja modal kepenanggulangan pandemi Covid 19 dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang berdampak.

2. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi karena memiliki nilai Sig 0,327 lebih dari taraf nyata 0,05. Hal ini sesuai dengan pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel (0,025:5) adalah 2,776 maka t hitung < t tabel (1,288 < 2,776). Tidak berpengaruhnya Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya penurunan pendapatan dari hotel dan restoran serta pusat pembelajaran lain akibat adanya pembatasan untuk melakukan perjalanan hal tersebut berakibat menurunnya pendapatan daerah berupa pajak Pajak Daerah dan Restribusi daerah.

3. Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 4.12 dapat dilihat hasil perhitungan dengan nilai F hitung sebesar 0,839 dengan nilai signifikansi sebesar 0.544 sedangkan nilai F tabel sebesar 19,00. Maka nilai F hitung > F tabel (0,839 < 19,00) artinya secara bersama-sama variabel independent tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari tabel 4.7 dapat diketahui tingkat signifikan adalah 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Pada gambar 4.5 terlihat bahwa plotting (titik-titik) yang menggambarkan data mengikuti atau tersebar mengikuti garis diagonal. Maka dari itu model regresi berdistribusi dinyatakan normal. Sedangkan berdasarkan tabel 4.11 hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square adalah -0.087. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu mempengaruhi atau menjelaskan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan atau bersama-sama sebesar -8,7% sisanya sebesar 108,7% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan, maka penulis menyarankan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kota Bogor

- Diharapkan lebih mengoptimalkan lagi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan menggali potensi-potensi dan sumber daya yang dimiliki serta memaksimalkan Kerjasama dengan pihak swasta maupun daerah agar pembangunan daerah Kota Bogor termasuk infrastruktur dapat berjalan lagi dan mewujudkan jasa dan industri pariwisata ekonomi kreatif dengan ditunjang oleh pembangunan yang baik. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan meningkat disamping PAD yang meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat Kota Bogor untuk meningkatkan alokasi dana Belanja Modal dapat dilakukan melalui pendataan secara akurat mengenai kebutuha-kebutuhan fasilitas publik yang dibutuhkan sehingga pemerintah Kota Bogor bisa mengalokasikannya dalam APBD.
- Memperbaiki dan membangun fasilitas publik yang masih kurang seperti jalan, kantor pelayanan masyarakat dan lain-lain. Kota Bogor sebaiknya meningkatkan Belanja Modal yang langsung dapat digunakan oleh masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, sehingga tingkat Pertumbuhan Ekonomi dapat ditingkatkan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Variabel dalam penelitian ini hanya ada dua variabel independen sehingga penelitian belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah diharapkan variabel independen yang digunakan lebih lengkap dan bervariasi misalnya memasukkan variabel dana alokasi, dana bagi hasil dan lain sebagainya serta menambah wilayah penelitian sehingga diperoleh sampel yang lebih banyak dan hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Aditya, Dina Mei Eka, & Maryono. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Provinsi/Wilayah Kalimantan dan Sulawesi). *Prosiding SENDI_U 2018*, 33, 631–639.
- Agus Susanto dan Sugiyono. 2015. *Cara Mudah Belajar SPSS Dan Lisrel Teori Dan Aplikasi Untuk Analisis Data*. Bandung: Alfabeta.
- Ali Ibrahim Hasyim. 2016. *Ekonomi Makro*. Jakarta: kencana prenada media.
- Amal, Baharuddin & Junaidin. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Anggoro, D. D., & Alfandia, N. S. (2018). Strategi Kebijakan Penggalan Pendapatan Asli Daerah. 13–23.
- Arini S, P. R. 2016. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta*, 2(2).
- B. Uno, Hamzah. 2008. *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Daulay, Rifda Atiqoh. 2020. *Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dewi, N. W. R., & Suputra, I. D. G. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuh Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1745–1773.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan kementerian keuangan, Laporan Realisasi APBD tahun 2015-2020.
- Douglas A. Lind, Williyam & Samuel. 2018. *Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit: Salemba Empat.
- Fajri, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Di Sumatera. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.

- Maryati, Ulfi dan Endrawati, 2010. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Sumatera Barat)”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Volume 5 Nomor 2 hal 68-84.
- Mahmudi. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, Mohamad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Nurmainah, S. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 131–141.
- Pad, P., Modal, B., & Pertumbuhan, T. (2021). *PARADOKS: JURNAL ILMU EKONOMI Volume 4. No. 3 (2021); Juli. 4(3)*.
- Palguno, M. D., & Valeriani, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018 Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang . *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 15, 105–116.
- Saragih, Reza Maulana. 2015. Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
- Setiawan, D. A., & Harsono, H. 2020. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Regional Economics*.
- Umara, Husein. 2013. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (Jakarta: Rajawali Pers).
- Utami, D. N., & Indrajaya, G. B. (2019). Pengaruh PAD Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8(10), 2195–2225.
- UU nomor 23 tentang pemerintah daerah
- UU nomor 1 th 2022 tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah
- Wardhiah. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Visioner & Strategis*, 7(1), 61–70.
- Wiksuna, L. K. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali . *E-Jurnal Manajemen Unud*.
- Yuliana. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal AKuntansi & Keuangan*, 5(1), 33–48.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Bagas Rudianto

Alamat : Perum Cikeas Country Blok C1 No. 7

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Juli 1998

Agama : Islam

Pendidikan :

- SDN 02 Bojong Nangka
- SMPN 2 Gunung Putri
- SMK 3 Bina Pendidikan Ciangsana
- Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2023

Penulis,

M. Bagas Rudianto

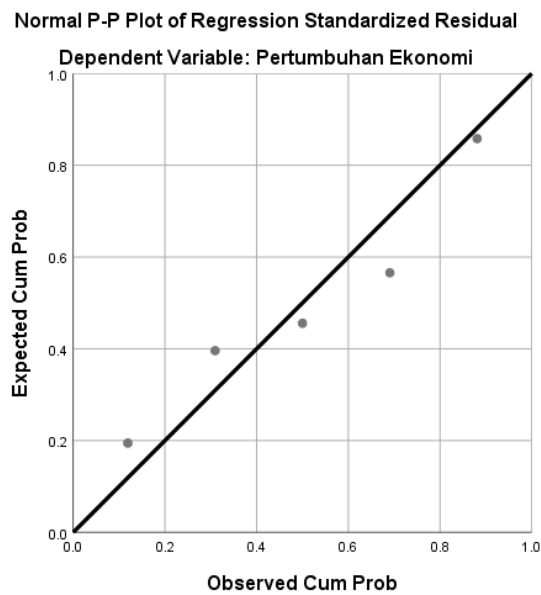
LAMPIRAN

Hasil perhitungan SPSS 25.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.12258774
Most Extreme Differences	Absolute	.207
	Positive	.207
	Negative	-.154
Test Statistic		.207
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.



Coefficients^a

Unstandardized Coefficients		Std. Error	Runs Test	
B			Test Value ^a	Unstandardized Residual
(Constant)	-31.330		Cases < Test Value	2
Belanja Modal	-.004		Cases >= Test Value	3
Pendapatan Asli Daerah	.040		Total Cases	5
			Number of Runs	3
			Z	.000
			Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Dependent Variable: Pe

a. Median

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017



PEMERINTAH KOTA BOGOR LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2016 (AUDITED)
1	PENDAPATAN					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1	2.311.874.306.346,00	2.289.359.362.675,33	99,03	2.192.370.082.886,0
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	917.788.606.450,00	978.197.741.947,33	106,58	783.873.587.219,0
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.2	521.166.260.000,00	555.475.409.588,00	106,58	492.138.653.391,0
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.3	42.132.557.467,00	49.043.299.929,00	116,40	62.727.631.456,0
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.4	29.752.889.788,00	29.949.487.128,00	100,66	33.107.211.225,0
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.1	324.736.899.195,00	343.729.545.302,33	105,85	195.900.091.147,0
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2	1.367.515.899.896,00	1.293.505.562.261,00	94,59	1.297.444.479.820,0
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1	1.143.528.373.156,00	1.072.486.473.770,00	93,79	1.097.614.311.436,0
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.2	94.689.511.214,00	90.543.462.595,00	95,62	74.818.598.774,0
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	22.024.549.634,0
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.4	835.715.338.942,00	791.929.143.000,00	94,76	806.089.544.000,0
1.2.2	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2	213.123.523.000,00	190.013.867.775,00	89,16	194.681.619.028,0
1.2.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2	223.987.526.740,00	221.019.088.491,00	98,67	199.830.168.384,0
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.2	223.987.526.740,00	221.019.088.491,00	98,67	199.830.168.384,0
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	26.549.800.000,00	17.656.058.467,00	66,45	71.052.015.847,0
1.3.2	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3	3.000.000.000,00	9.000.000.000,00	300,00	14.100.000.000,0
2	BELANJA	5.1.1.3	23.569.800.000,00	8.656.058.467,00	36,73	56.946.015.847,0
2.1	BELANJA OPERASI	5.1.2	2.597.457.444.562,00	2.245.590.002.913,62	86,45	2.115.296.888.270,00
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1	2.055.327.080.847,00	1.806.456.260.619,62	87,89	1.556.442.743.532,00
2.1.2	Belanja Barang	5.1.2.2	1.202.379.781.431,00	1.030.115.640.840,16	85,67	1.044.030.978.405,00
2.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1	733.911.128.849,00	666.457.980.054,46	90,81	483.899.789.155,00
2.1.4	Belanja Hibah	5.1.2.1	5.685.279.327,00	5.685.279.325,00	100,00	2.646.196.572,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1	81.832.872.400,00	75.813.412.400,00	92,64	26.636.028.500,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1	31.518.018.840,00	28.383.948.000,00	90,06	29.748.900,00
2.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	507.090.025.022,00	433.491.716.724,00	85,49	552.484.517.036,00
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	5.123.940.000,00	1.426.177.314,00	27,83	9.338.193.940,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	127.183.102.407,00	100.771.500.035,00	79,23	101.623.727.575,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	169.827.707.351,00	145.187.264.010,00	85,49	156.173.673.849,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	204.140.185.264,00	185.381.517.846,00	90,80	285.046.941.672,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	795.090.000,00	725.257.519,00	91,22	301.980.000,00

NO URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2016 (AUDITED)
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	28.079.575.767,00	2.270.085.956,00	8,08	5.370.006.482,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	28.079.575.767,00	2.270.085.956,00	8,08	5.370.006.482,00
2.4	TRANSFER	5.1.3	6.960.762.926,00	3.371.939.614,00	48,44	999.621.220,00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	5.1.3.1	6.960.762.926,00	3.371.939.614,00	48,44	999.621.220,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.1.3	6.960.762.926,00	3.371.939.614,00	48,44	999.621.220,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(285.583.138.216,00)	43.769.359.761,71	(15,33)	37.073.194.616,00
3	PEMBIAYAAN	5.1.4				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	5.1.4.1	304.817.138.216,00	305.753.186.216,00	100,31	340.597.623.600,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.1.4.1.1	304.817.138.216,00	304.817.138.216,00	100,00	339.661.575.600,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1.5	0,00	936.048.000,00	0,00	936.048.000,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	5.1.4.2	19.234.000.000,00	19.234.000.000,00	100,00	72.853.680.000,00
3.2.2	Penyerjanaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	5.1.4.2.2	19.234.000.000,00	19.234.000.000,00	100,00	71.917.632.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.2.4	0,00	0,00	0,00	936.048.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		285.583.138.216,00	286.519.186.216,00	100,33	267.743.943.600,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	330.288.545.977,71	0,00	304.817.138.216,00

PIL. WALIKOTA

 I. USMAR HARINAR

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2018



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO URUT	URAIAN	REFP	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2017 (AUDITED)
1	PENDAPATAN	5.1.1	2.334.692.104.183,00	2.328.703.432.668,88	99,74	2.289.359.362.675,33
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	887.396.041.682,00	912.197.971.288,88	102,79	978.197.741.947,33
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	578.700.000.000,00	592.378.746.862,00	102,47	553.275.409.588,00
1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	44.449.594.000,00	48.418.070.315,00	108,93	49.043.299.929,00
1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	27.969.594.780,00	26.772.427.406,00	95,72	29.949.487.128,00
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	216.276.852.902,00	244.028.726.708,88	103,28	343.729.545.302,33
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.329.137.583.795,00	1.303.332.063.609,00	98,06	1.293.505.562.261,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	1.087.823.566.000,00	1.066.762.734.201,00	98,06	1.072.486.473.770,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	83.996.938.000,00	70.988.926.350,00	84,51	90.543.462.995,00
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.1.1.2	20.180.539.000,00	23.969.468.586,00	118,78	0,00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.1.3	791.929.143.000,00	791.929.143.000,00	100,00	791.929.143.000,00
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.1.4	191.716.946.000,00	179.875.196.265,00	93,82	190.013.867.775,00
1.2.1.2	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.2	241.314.017.795,00	236.569.329.408,00	98,03	221.019.088.491,00
1.2.1.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.2.1	241.314.017.795,00	236.569.329.408,00	98,03	221.019.088.491,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	118.158.478.746,00	113.173.397.771,00	95,78	17.656.058.467,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	92.126.747.546,00	87.142.218.371,00	94,59	9.000.000.000,00
1.3.1.3	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.1.3	26.031.731.200,00	26.031.179.400,00	100,00	8.656.058.467,00
2	BELANJA	5.1.2	2.656.280.650.160,71	2.406.586.936.843,04	90,60	2.245.590.002.913,62
2.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.118.814.639.370,71	1.945.851.266.176,04	91,84	1.806.456.260.619,62
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.195.970.034.526,71	1.108.690.038.689,00	92,70	1.030.115.640.840,16
2.1.1.2	Belanja Barang	5.1.2.1.1.2	749.808.967.659,00	672.795.038.324,21	89,73	666.457.980.054,46
2.1.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.1.3	7.000.000.000,00	6.598.058.977,83	94,26	5.685.279.325,00
2.1.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.1.5	122.276.492.285,00	118.993.313.285,00	97,31	75.813.412.400,00
2.1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.6	43.759.144.900,00	38.774.816.900,00	88,61	28.383.948.000,00
2.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	512.432.788.564,00	455.461.723.593,00	88,88	433.491.716.724,00
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	10.111.980.000,00	9.114.649.200,00	92,11	1.426.177.334,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	111.358.670.675,00	101.665.269.154,00	91,30	100.771.500.039,00
2.2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.2.3	71.633.896.252,00	66.483.846.768,00	92,81	145.187.264.030,00
2.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.2.4	316.573.318.774,00	276.323.614.766,00	87,25	185.381.517.846,00
2.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.2.5	2.754.922.863,00	1.774.343.705,00	64,41	725.257.519,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	19.876.006.034,00	1.557.079.950,00	7,83	2.270.085.956,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	19.876.006.034,00	1.557.079.950,00	7,83	2.270.085.956,00

NO URUT	URAIAN	REFP	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2017 (AUDITED)
2.4	TRANSFER	5.1.3	5.157.216.192,00	3.716.867.124,00	72,07	3.371.939.614,00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	5.1.3.1	5.157.216.192,00	3.716.867.124,00	72,07	3.371.939.614,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.1.3	5.157.216.192,00	3.716.867.124,00	72,07	3.371.939.614,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(321.588.545.977,71)	(77.883.504.174,19)	24,22	43.769.359.761,71
3	PEMBIAYAAN	5.1.4	333.288.545.977,71	388.671.502.466,71	116,62	305.753.186.216,00
3.1	PENERIMAAN DAERAH	5.1.4.1	333.288.545.977,71	330.288.545.977,71	100,00	304.817.138.216,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.1.4.1.1	330.288.545.977,71	330.288.545.977,71	100,00	0,00
3.1.1.4	Pinjaman Dalam Negeri		0,00	55.640.571.400,00		0,00
3.1.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1.5	3.000.000.000,00	2.742.383.089,00	91,41	936.048.000,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	5.1.4.2	11.700.000.000,00	54.223.415.589,00	463,45	19.234.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.4.2.2	8.700.000.000,00	8.700.000.000,00	100,00	19.234.000.000,00
3.2.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.2.2.4	3.000.000.000,00	45.523.415.589,00	1.517,45	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO		321.588.545.977,71	334.448.086.877,71	104,00	286.519.186.216,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	256.564.582.703,52	0,00	330.288.545.977,71



Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019



PEMERINTAH KOTA BOGOR LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2018 (AUDITED)
1	PENDAPATAN					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	972.607.288.978,00	1.015.884.216.919,86	104,45	912.197.971.288,85
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	644.546.554.586,00	689.543.300.040,00	106,98	592.978.746.862,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1	53.446.789.400,00	51.362.153.192,00	96,10	48.418.036.315,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1	28.083.707.761,00	28.241.845.911,00	100,56	26.772.427.406,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1	246.530.237.231,00	246.737.212.776,86	100,08	244.028.726.785,85
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.577.997.671.710,00	1.455.644.330.874,00	92,25	1.303.332.063.609,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	5.1.1.2	1.162.190.020.000,00	1.106.494.405.814,00	95,21	1.086.762.734.201,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2	73.713.874.000,00	53.495.746.384,00	72,57	70.980.766.350,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2	27.816.418.000,00	24.159.177.895,00	86,85	23.969.488.586,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2	856.297.349.000,00	818.946.149.000,00	95,65	791.929.143.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2	104.363.179.000,00	109.891.322.535,00	105,32	179.875.196.365,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	5.1.1.2	41.073.011.000,00	41.073.011.000,00	100,00	0,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	5.1.1.2	41.073.011.000,00	41.073.011.000,00	100,00	0,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2	250.615.369.110,00	252.139.954.160,00	100,61	236.569.329.408,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2	250.615.369.110,00	252.139.954.160,00	100,61	236.569.329.408,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bantuan Keuangan	5.1.1.2	124.119.271.600,00	95.936.979.900,00	77,27	0,00
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.1.1.2	124.119.271.600,00	95.936.979.900,00	77,27	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	89.385.600.000,00	88.128.640.000,00	98,84	113.173.397.771,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	89.385.600.000,00	88.128.640.000,00	98,84	87.142.218.171,00
1.3.2	Pendapatan Dana Barisat	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	26.031.179.600,00
	JUMLAH PENDAPATAN		2.639.970.560.688,00	2.559.857.207.793,86	96,97	2.326.703.432.648,85
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.235.899.827.533,52	2.025.462.086.541,19	90,59	1.945.851.266.176,04
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1	1.103.512.672.792,52	1.181.889.361.829,00	106,97	1.108.490.038.689,00
2.1.2	Belanja Barang	5.1.2.1	789.887.964.541,00	711.191.422.815,19	90,03	672.795.038.324,21
2.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1	3.000.000.000,00	4.578.046.142,00	152,60	6.588.058.977,83
2.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1	45.099.234.000,00	79.149.334.000,00	175,53	118.991.313.285,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1	50.399.956.200,00	66.743.921.755,00	132,45	16.776.816.900,00
2.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	630.349.995.579,00	501.033.407.778,00	79,48	455.461.723.993,00
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.2	21.520.000.000,00	18.044.020.000,00	83,84	9.314.649.000,00
2.2.2	Belanja Perawatan dan Mesin	5.1.2.2	117.133.344.792,00	99.754.707.372,00	85,16	101.665.269.154,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2	163.100.280.116,00	144.703.165.317,00	88,77	66.483.846.768,00
2.2.4	Belanja Jalan, Inggat dan Jaringan	5.1.2.2	324.769.819.437,00	235.965.307.071,00	72,66	276.223.614.766,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2	2.109.630.740,00	1.910.823.018,00	90,58	1.734.343.705,00
2.3	BELANJA MODAL	5.1.2.2	630.349.995.579,00	501.033.407.778,00	79,48	455.461.723.993,00
2.3.1	Belanja Tanah	5.1.2.2	21.520.000.000,00	18.044.020.000,00	83,84	9.314.649.000,00
2.3.2	Belanja Perawatan dan Mesin	5.1.2.2	117.133.344.792,00	99.754.707.372,00	85,16	101.665.269.154,00
2.3.3	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2	163.100.280.116,00	144.703.165.317,00	88,77	66.483.846.768,00
2.3.4	Belanja Jalan, Inggat dan Jaringan	5.1.2.2	324.769.819.437,00	235.965.307.071,00	72,66	276.223.614.766,00
2.3.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2	2.109.630.740,00	1.910.823.018,00	90,58	1.734.343.705,00
2.4	TRANSFER					
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	5.1.3	0,00	0,00	0,00	3.716.867.124,00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3	0,00	0,00	0,00	3.716.867.124,00
2.5	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.4	5.157.216.192,00	1.995.853.019,00	38,70	0,00
2.5.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.4	4.042.013.000,00	1.821.845.129,00	45,05	0,00
2.5.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.4	1.115.203.192,00	173.997.890,00	15,59	0,00
	JUMLAH BELANJA		2.871.218.762.599,52	2.526.504.949.919,19	87,99	2.402.870.069.719,04
3	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5	262.061.614.963,52	401.802.129.830,52	153,32	388.671.502.466,71
3.1	Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.1.5.1	256.564.582.703,52	256.564.582.703,52	100,00	330.288.545.977,71
3.1.1	Pinjaman Dalam Negeri	5.1.5.1.1	0,00	139.752.780.949,00	0,00	55.440.573.480,00
3.1.1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.5.1.2	5.497.032.260,00	5.484.766.178,00	99,78	2.742.383.099,00
3.2	PENGULANGAN PEMBIAYAAN	5.1.5.2	25.456.196.840,00	155.495.408.833,00	608,07	54.223.415.589,00
3.2.1	Pembiayaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.5.2.1	20.159.164.600,00	16.802.000.000,00	83,35	8.700.000.000,00
3.2.2	Pembiayaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.5.2.2	5.296.992.240,00	139.495.408.833,00	2,63	0,00
3.2.3	Pembiayaan Pinjaman Daerah	5.1.5.2.3	0,00	0,00	0,00	45.523.415.589,00
	PEMBIAYAAN NETTO		236.605.418.103,52	246.306.520.997,52	104,19	334.448.086.877,71
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	277.682.925.853,19	0,00	256.564.582.703,52



Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2020

Akun	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	2.434,34 M	2.428,58 M
PAD	1.083,41 M	872,02 M
Pajak Daerah	733,28 M	509,04 M
Retribusi Daerah	60,83 M	35,01 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	36,04 M	31,93 M
Lain-lain PAD yang sah	253,26 M	296,04 M
TKDD	1.069,38 M	1.112,10 M
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.069,38 M	1.112,10 M
Pendapatan Lainnya	281,55 M	444,46 M
Pendapatan Transfer Antar Daerah	281,16 M	303,40 M
Pendapatan Hibah	0,40 M	141,06 M
Belanja Daerah	2.604,49 M	2.354,87 M
Belanja Pegawai	1.218,66 M	1.010,11 M
Belanja Barang dan Jasa	870,53 M	798,84 M
Belanja Modal	377,31 M	276,16 M
Belanja Lainnya	138,00 M	269,76 M
Belanja Bunga	8,01 M	5,43 M
Belanja Hibah	55,92 M	93,23 M
Belanja Bantuan Sosial	57,93 M	43,69 M
Belanja Tidak Terduga	15,00 M	126,28 M
Belanja Bagi Hasil	0,00 M	0,00 M
Belanja Bantuan Keuangan	1,13 M	1,13 M
Surplus/(Defisit)	-170,15 M	73,71 M
Pembiayaan Daerah	326,15 M	285,95 M
Penerimaan Pembiayaan Daerah	501,81 M	366,50 M
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	169,31 M	277,64 M
Penerimaan Pinjaman Daerah	312,00 M	64,32 M
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5,50 M	0,00 M
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15,00 M	24,54 M
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	175,66 M	80,55 M
Penyertaan Modal Daerah	14,16 M	24,30 M
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	161,50 M	56,25 M
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2020 (AUDITED)
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	914.550.650,330,00	1.075.240.926,213,11	117,57	872.017.242,152,12
3	Pendapatan Pajak Daerah	565.600.000,000,00	624.764.886,149,00	110,46	509.039.468,746,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	31.609.433,495,00	36.033.010,539,00	113,99	35.010.375,259,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disihkan	32.420.532,150,00	32.420.532,150,00	100,00	31.927.293,792,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	284.920.664,675,00	357.002.477,375,11	124,07	296.040.104,355,12
7	PENDAPATAN TRANSFER	1.461.272.579,401,00	1.463.000.794,326,00	100,12	1.415.498.666,396,00
8	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.060.368.329,482,00	1.070.122.263,566,00	100,92	1.083.171.964,899,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak	80.362.121,814,00	100.809.913,891,00	124,82	86.344.561,026,00
10	Dana Bagi Hasil Sempur Daya Alam	38.884.164,485,00	42.781.743,303,00	110,28	38.670.158,675,00
11	Dana Alokasi Umum	751.862.549,000,00	751.862.549,000,00	100,00	762.556.115,000,00
12	Dana Alokasi Khusus	189.259.496,183,00	170.168.021,371,00	89,91	195.501.128,158,00
13	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	57.017.287,000,00	57.017.287,000,00	100,00	28.928.586,000,00
14	Dana Pengusutan	57.017.287,000,00	57.017.287,000,00	100,00	28.928.586,000,00
15	Transfer Pemerintah Provinsi	245.037,063,719,00	238.649.379,030,00	97,40	222.967.276,647,00
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	245.037,063,719,00	238.649.379,030,00	97,40	222.967.276,647,00
17	Bantuan Keuangan	98.859,899,200,00	97.211,866,740,00	98,33	80.430.838,850,00
18	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	98.859,899,200,00	97.211,866,740,00	98,33	80.430.838,850,00
19	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	106.325.528,000,00	106.539.215,238,00	100,20	141.063.995,101,00
20	Pendapatan Hibah	106.325.528,000,00	106.324.701,000,00	100,00	141.063.995,101,00
21	Pendapatan Lainnya	0,00	214.514,238,00	0,00	0,00
22	JUMLAH PENDAPATAN	2.482.148.757,721,00	2.644.780.935,737,11	106,55	2.428.579.503,649,12
23	BELANJA				
24	BELANJA OPERASI	2.331.894.995,723,00	2.195.790.762,074,00	94,16	1.951.301.711,023,00
25	Belanja Pegawai	1.114.317.702,735,00	1.091.969.595,660,00	97,99	1.010.111.841,189,00
26	Belanja Barang	1.081.139.499,721,00	981.671.284,413,00	90,80	798.891.560,650,00
27	Bunga	7.000,000,000,00	4.647.853,424,00	57,83	5.427.749,091,00
28	Hibah	72.728.443,737,00	68.284.378,577,00	93,89	94.233.837,387,00
29	Bantuan Sosial	56.709.150,000,00	49.817.650,000,00	87,85	43.886.202,308,00
30	BELANJA MODAL	477.902.795,330,00	418.874.649,797,00	87,65	276.157.283,039,00
31	Belanja Tanah	1.100.000,000,00	456.222,000,00	41,47	2.772.077,406,00
32	Belanja Perawatan dan Mesin	148.140.521,025,00	134.821.926,424,00	91,02	129.790.481,108,00
33	Belanja Gedung dan Bangunan	90.558.513,200,00	75.413.412,539,00	83,28	80.894.955,339,00
34	Belanja Jalan, Irigasi dan Jernigan	235.110.208,051,00	206.667.544,227,00	87,90	109.784.633,171,00

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2020 (AUDITED)
35	Belanja Ases Tetap Lainnya	2.471.739.964,00	1.037.371.248,00	41,94	1.789.184.630,00
36	Belanja Ases Lainnya	529.813,090,00	477.772.759,00	90,18	1.325.953,175,00
37	BELANJA TAK TERDUGA	30.111.279,308,00	21.400.409,034,00	71,07	18.277.177.930,00
38	Belanja Tak Terduga	30.111.279,308,00	21.400.409,034,00	71,07	18.277.177.930,00
39	JUMLAH BELANJA	2.839.909.070,361,00	2.634.065.820,905,00	92,82	2.303.736.171,982,00
40	TRANSFER				
41	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TRANSFER BANTUAN KEARIFAN	1.700.000,000,00	1.660.750,000,00	97,69	1.134.331.000,00
44	Transfer Bantuan Kearifan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.700.000,000,00	1.660.750,000,00	97,69	1.134.331,000,00
45	Transfer Bantuan Kearifan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
46	JUMLAH TRANSFER	1.700.000,000,00	1.660.750,000,00	97,69	1.134.331,000,00
47	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.841.609.070,361,00	2.632.726.570,905,00	92,83	2.304.870.702,982,00
48	SURPLUS / (DEFISIT)	(359.460.312.640,00)	7.054.364.872,11	(1,96)	73.708.800,667,12
49	PEMBIAYAAN				
50	PEMBIAYAAN DAERAH	364.957.344,800,00	493.565.383,802,31	135,24	334.337.716,975,19
51	Penggunaan Sisa Lebih Penutupan Anggaran (SL-PA)	327.501.176,740,00	327.542.136,075,31	100,01	277.640.687,080,19
52	Pinjaman Dalam Negeri	31.959.156,400,00	160.538.461,051,00	503,32	32.599.096,032,00
53	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.497.032,260,00	5.484.766,176,00	99,78	5.484.766,176,00
54	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	19.053.167,687,00
55	PENGLIBARAN DAERAH	5.497.032,260,00	135.617,812,976,00	2.467,11	80.345.341,402,00
56	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	24.300.000,000,00
57	Penyertaan Pasuk Pinjaman Dalam Negeri	5.497.032,260,00	135.617,812,976,00	2.467,11	56.045.341,402,00
58	PEMBIAYAAN NETTO	399.460.312,640,00	357.947.570,826,31	89,60	253.792.375,573,19
59	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLPA)	0,00	365.001.935,698,42	0,00	327.501.176,240,11

